

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh merupakan salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam bidang budaya dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai hasil analisis dokumen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut

a. Visi & Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh saat ini dan masa yang akan datang. Visinya adalah harus mampu menempatkan pembangunan budaya dan pariwisata Kota Banda Aceh yang bermartabat, berlandaskan adat istiadat dan kebudayaan Aceh yang bernuansa Islami. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2013- 2017 adalah Terwujudnya Kota Banda Aceh Sebagai Destinasi Wisata yang berbasis Budaya dan Religi.¹⁵⁶

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan visinya. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sebagai organisasi pemerintah, maka rumusan misi yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan

¹⁵⁶Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh 2013

Pariwisata adalah berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai institusi pelayan masyarakat. Adapun misi Dinas Kebudayaan dan pariwisata adalah :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
2. Menyelenggarakan pemberian perizinan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
3. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
4. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan¹⁵⁷ . .

Sebagai penjabaran dari misi, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada hasil analisis sesuai kondisi-kondisi internal dan eksternal organisasi. Tujuan akan mengarahkan organisasi pada pencapaian sasaran-sasaran, cara untuk mencapai sasaran dan faktor-faktor lain dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus dapat dijadikan sebagai petunjuk (indikator) dari pencapaian misi organisasi.

Untuk mencapai misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Menyusun perencanaan kepariwisataan berbasis budaya dan religi;
- b. Mengoptimalkan potensi objek-objek wisata, budaya, sejarah, religi dan edukasi tsunami sebagai objek unggulan kepariwisataan Banda Aceh;
- c. Membangun kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kepariwisataan Banda Aceh;
- d. Meningkatkan kualitas dan profesional sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;

¹⁵⁷ *Ibid*

- e. Menyiapkan suatu informasi kepariwisataan dan budaya serta mengoptimalkan pelayanan kepariwisataan;
- f. Menumbuh kembangkan sikap sadar wisata dan sadar budaya dalam masyarakat¹⁵⁸.

Proses penyusunan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun berdasarkan visi pembangunan daerah dengan mengacu pada perspektif pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel, transparansi serta profesional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang budaya dan pariwisata harus memiliki komitmen yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Melalui komitmen ini diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami. Perwujudan visi ini adalah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banda Aceh serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.

- b. Evaluasi Diri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa

¹⁵⁸ *Ibid*

dicapai. Evaluasi merupakan kajian untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan penting organisasi untuk menjelaskan tentang keberadaan organisasi secara menyeluruh baik kondisi internal maupun eksternalnya..

Kondisi dan kemampuan internal organisasi adalah berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia, peralatan, sistem dan prosedur kerja, informasi, finansial, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, pengalokasian dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Evaluasi internal organisasi merupakan prasyarat dalam menata dan merancang tujuan yang ingin dicapai. Organisasi memiliki proses internal yang baik jika terdapat prosedur baku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, ada komitmen dan integritas pegawai, arus informasi berjalan baik, pemberian penghargaan dan saling percaya sesama anggota organisasi.

Evaluasi eksternal organisasi berkenaan dengan bagaimana organisasi merencanakan dan mengelola kemitraan eksternal dengan sumber-sumber internalnya untuk mendukung kebijakan dan strateginya dalam proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Organisasi harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sebab hanya organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan dapat bertahan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk pembenahan dan perbaikan kondisi internalnya. Kondisi internal dan eksternal organisasi yang saling mendukung, memungkinkan organisasi lebih mudah dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Lingkungan internal Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berkenaan dengan sumber daya organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh susunan struktur organisasi terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian¹⁵⁹

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang umum, di bidang sejarah dan kebudayaan, pengembangan destinasi, promosi dan pemasaran, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
3. Penata usahaan keuangan dan pengelolaan asset dinas;
4. Pembinaan aparatur kepegawaian;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata
8. Pembinaan UPTD;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya¹⁶⁰.

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid*

- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - c. Melakukan penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
 - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai tugasnya¹⁶¹.
 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan;
 - b. Menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas;
 - d. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
 - e. Menyiapkan surat perintah membayar;
 - f. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan ;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
 - h. Melakukan pembinaan , pengawasan dan pengendalian keuangan;
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pada Subbagian Keuangan dan program;;
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya¹⁶².

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

3. Sub Bagian kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya¹⁶³.

c. Bidang sejarah dan Kebudayaan

Kepala bidang Sejarah dan Kebudayaan mempunyai tugas di bidang permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, fasilitasi dan pengembangan seni budaya serta pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang sejarah dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsinya :

1. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang sejarah dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang sejarah dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sejarah dan kebudayaan
4. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya¹⁶⁴.

Bidang Sejarah dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Purbakala
2. Seksi pengembangan seni budaya

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

3. Seksi Pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional¹⁶⁵.

d. Bidang Pengembangan Destinasi

Kepala bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas di bidang potensi, objek dan kawasan wisata, pengembangan lembaga kepariwisataan serta pengembangan industri dan usaha jasa wisata. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang Pengembangan Destinasi menyelenggarakan fungsinya;

1. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi;
2. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya¹⁶⁶.

Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari:

- a. Sektore Potensi objek dan kawasan wisata
 - b. Sektore Pengembangan lembaga kepariwisataan
 - c. Sektore Pengembangan Industri dan usaha jasa wisata
- e. Bidang Promosi dan Pemasaran

Kepala bidang promosi dan pemasaran mempunyai tugas di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata, pemasaran kebudayaan dan pariwisata serta kerjasama kebudayaan dan pariwisata. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemasaran;

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ *Ibid*

2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi dan pemasaran;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pemasaran;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya¹⁶⁷.

Bidang promosi dan pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata
 - b. Seksi Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata
 - c. Seksi Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata, pelayanan informasi kepariwisataan serta pengawasan kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya¹⁶⁸.

Bidang Pembinaan dan pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi pembinaan masyarakat sadar wisata
- b. Seksi Pelayanan Informasi
- c. Seksi Pengawasan Kebudayaan dan Pariwisata

¹⁶⁷*Ibid*

¹⁶⁸*Ibid*

b. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

1. Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 35 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural Esselon II.b, 1 orang pejabat struktural Esselon III.a, 4 orang pejabat struktural Eselon III.b, 14 orang IV.a, dan staf 14 orang. Saat ini terdapat 1 orang tenaga honorer dan 6 orang tenaga kontrak. Rincian Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:.

Tabel 4.1.

Rincian Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Struktural	21	1 org eselon II.b 1 org eselon III.a 4 org eselon III.b 15 org eselon IV.a
2.	Staf	14	
3.	Tenaga honorer	1	
4.	Tenaga kontrak	6	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh 2013.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh sebanyak 36 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 24 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan I sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.

Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	4	11,4
III	24	68,6
II	6	17,1
I	1	2,9
JUMLAH	35	100,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, 2013.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar yaitu golongan III sebesar 57,1 %, Apabila dilihat dari persentase berdasarkan golongan, menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh belum maksimal. Karena pegawai golongan III banyak mendekati masa kerja pensiun. Namun demikian hal ini juga belum dapat menunjukkan kualitas dan kinerja seperti yang diharapkan.

2. Perlengkapan

Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumber daya manusia yang profesional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh belum dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh seperti terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.3.

Rincian Sarana dan Fasilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 persial
2.	Bangunan Gedung	1 unit
3.	Alat Angkutan	4 unit
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	230 unit
5.	Komputer	12 unit
6.	Alat Studio	21 unit

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh (diolah), 2013

Lingkungan internal Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berkenaan upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Program Visit Banda Aceh Tahun 2011-2013, melalui beberapa agendanya, yaitu :

1. Penyelenggaraan Festival Peunayong dan Festival Krueng Aceh.

Festival ini memiliki beberapa acara antara lain lomba perahu, lomba tangkap bebek, dan lain lain. Semuanya dipusatkan di Peunayong, salah satu kota tertua di Banda Aceh, dan mayoritas penduduknya kaum tionghoa alias bangsa China.

2. Lomba Foto Wisata

Lomba foto wisata ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerjasama dengan 5 productions dan menggandeng Bomsky selaku management organizer. Merupakan salah satu upaya mempromosikan wisata Banda Aceh menuju visi Banda Aceh sebagai kota Bandar Wisata Islami dan kota Madani. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh menjadi barometer terhadap kemajuan wisata di daerah ini. Lomba foto adalah salah satu upaya memperkenalkan wisata Aceh melalui fotografi.

3. Putro Phang Art and *Music Weekend Show*

Putroe Phang Art and *Music Show* adalah parade seni dan pertunjukan musik yang diselenggarakan secara teratur di salah satu situs sejarah Aceh yaitu Taman Putroe Phang. Acara ini memepertunjukkan berbagai macam atraksi seni termasuk musik dan tari seperti Dalail Khairat, Debus dan Tambur.

4. *Tour The Bycicle*

Kegiatan lomba sepeda dengan target peserta lokal dan mancanegara yang mengambil rute pantai barat Aceh (Banda Aceh – Calang) yang sangat fantastis. Kegiatan ini merupakan ajang promosi keindahan wisata alam Aceh khususnya pantai.

5. International Geulayang Tunang

Kegiatan ini merupakan lomba layang-layang tradisonal yang diikuti oleh peserta lokal dan mancanegara. Berbagai corak layangan khas masing-masing negara akan tampil dan menghias langit Aceh. Acara ini disemarakkan dengan pameran pariwisata dan budaya serta atraksi kesenian Aceh

6. *Aceh Coffee and Food Festival*

Merupakan kegiatan tahunan yang menggelar berbagai kuliner khas aceh dan kopi Aceh yang terkenal. Pengunjung dapat melihat dan menikmati berbagai kuliner khas yang ada di Aceh dan hanya disuguhkan pada waktu-waktu tertentu. Festival kopi ini menjadi salah satu upaya dalam mempromosikan potensi wisata daerah ini. Festival kopi ini berlangsung setiap tahun sejak 2011 dan mendapat apresiasi cukup baik. Tujuan lain dari festival tersebut adalah bagaimana upaya bersama dalam memperkenalkan cita rasa kopi Aceh, tidak hanya masyarakat nusantara tapi juga dunia internasional.

7. Duta Wisata Banda Aceh

Pemilihan Duta Wisata Banda Aceh yang berlangsung rutin pada setiap tahun. Mewujudkan program pariwisata Banda Aceh yang lebih baik ke depan termasuk dengan mengikuti *event-event* promosi kepada turis domestik maupun internasional yang tiap tahun meningkat berkunjung ke Banda Aceh. Para Duta Wisata Aceh ini diharapkan mampu mempromosikan Banda Aceh sesuai visi-misinya, yaitu menjadi Kota Madani dan juga harus menguasai pariwisata Aceh secara menyeluruh, khususnya BASAJAN (Banda Aceh – Sabang – Jantho) yang telah diikrarkan sejak lama.

8. Piasan Seni Banda Aceh

Ajang Piasan Seni Banda Aceh sebagai sebuah ajang penting dalam rangka melestarikan seni dan budaya. Ajang Piasan Seni Banda Aceh menampilkan berbagai jenis kesenian Aceh, mulai dari seni tutur, seni tari hingga seni rupa ini merupakan ajang untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa seni asli Aceh itu masih ada untuk kemudian harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga mampu menjadi tuan di negeri sendiri serta mampu bersaing dengan kesenian luar.

Demikian antara lain berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan pariwisatanya dalam upaya memperkenalkan potensi objek wisata maupun wisata

kulinernya. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan potensi wisata yang terdapat di Provinsi Aceh dan secara khusus di Kota Banda Aceh dapat dikenal secara luas, tidak saja bagi wisatawan nusantara namun juga wisatawan mancanegara. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa tidaklah mudah menjadikan Aceh sebagai destinasi pilihan kunjungan wisata, namun melalui kegiatan-kegiatan ini paling tidak terdapat pilihan acara dan waktu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Banda Aceh.

Lingkungan eksternal Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berkenaan perencanaan dan pengelolaan kemitraan dalam proses pencapaian tujuannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, seperti :

- a. Kerjasama regional Basajan

Kerjasama regional Basajan adalah kerjasama yang bersifat cross boundary yang melibatkan beberapa daerah untuk mendorong kemajuan bersama. Motivasi yang sama menjadi dasar bagi pendirian kerjasama regional Basajan (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Jantho/ Kabupaten Aceh Besar). Pendirian kerjasama regional Basajan bertujuan untuk menjadikan Basajan menjadi sebuah kawasan kekuatan ekonomi baru dan berkelanjutan di tahun 2020 melalui usaha bersama tiga daerah yang terlibat. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini terbagi menjadi 2 yaitu: secara umum terbangunnya Konsep Kerjasama Pariwisata Terintegrasi dan Program Bidang Pariwisata Basajan yang Konkrit. Tujuan Khusus adalah Pengenalan potensi pariwisata di tiga daerah, melahirkan konsep kerjasama pariwisata yang aplikatif dan melahirkan program kerjasama pariwisata daerah Basajan.

- b. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, dengan mengusung tema “Peran Kampus Dalam Wisata Religi Menuju kota Banda Aceh Kota Madani”. Bahwa Banda Aceh sebagai kota Madani, sejatinya menyertakan partisipasi semua elemen

masyarakat. Termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Fakultas Ushuluddin yang mengembangkan ilmu keUshuluddin memiliki peran strategis untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang Madani. Untuk menciptakan sebuah kota yang madani, tidaklah tugas pemerintah semata, dimana semua lapisan masyarakat termasuk akademisi harus saling mendukung untuk terciptanya sebuah kota yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat.¹⁶⁹

2. Kerjasama internasional dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata seperti

a. Pertemuan *Fam Trip* dan *Table Top Travel*.

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh menggelar pertemuan *Fam Trip* dan *Table Top Travel* dengan *Agent Malaysia*. Pertemuan ini bertujuan untuk menggenjot potensi wisata dan membahas paket wisata yang dapat dijual untuk masyarakat di dua negara. Kerjasama ini juga diharapkan kesediaan dari pada *travel agent* dari Malaysia menjadi duta-duta wisata kota Banda Aceh, untuk mempromosikan objek-objek wisata di Aceh dan Kota Banda Aceh.

b. Kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Huddinge (Swedia) terkait pengelolaan sampah dan pengembangan sektor wisata. Swedia adalah sebuah negara yang sangat bersih dan hijau serta wisatanya yang bagus. Kerjasama ini diharapkan akan mempercepat program Banda Aceh menjadikan kota yang bersih dan hijau seperti Kota Huddinge.¹⁷⁰

c. Kerjasama Banda Aceh dan Kota Apeldoorn (Amsterdam-Belanda) sebagai Kota kembar (*Sister City*). Penjajagan kerjasama ini telah dimulai melalui Kunjungan kerja Wakil Pemerintah Kota Banda Aceh

¹⁶⁹Banda Aceh Buat MoU Dengan Ushuluddin Bangun Kota Madani, <http://theglobejournal.com/cities/banda-aceh-buat-mou-dengan-ushuluddin-bangun-kota-madani/index.php>

¹⁷⁰Banda Aceh dan Huddinge Swedia Jajaki Kerjasama Pengelolaan Sampah, bandaacehkota.go.id/berita371-

ke Apeldoorn (Amsterdam-Belanda). Kerjasama ini merupakan peningkatan dan Pengembangan SDM aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk rencana kerjasama bidang pariwisata.

- d. Penjajakan kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Silk Air melalui pembukaan rute Singapura-Banda Aceh. Kerjasama dilakukan lebih mengarah kepada kesiapan pelayanan dan jumlah penumpang yang membutuhkan penerbangan langsung dari Banda Aceh ke Singapura dan sebaliknya. Melalui kerjasama ini diharapkan akan menguntungkan dunia pariwisata karena akan ada warga singapura yang akan mengunjungi Banda Aceh untuk menikmati wisata Tsunami, wisata Kuliner, Budaya yang selama ini gaungnya sudah terasa oleh masyarakat di Singapura.
- e. Kerjasama *Sister City* Banda Aceh-Samarqand yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembentukan Kerjasama Kota dan Kemitraan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Samarqand ditandatangani di Banda Aceh (31/5). Disepakatinya Kerjasama Kemitraan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan Indonesia dengan Uzbekistan. Adanya kesamaan latar belakang sejarah dan sosial budaya yang erat antara kota Banda Aceh dan Samarqand mendorong pemerintah kedua kota untuk mengadakan kerjasama kemitraan *sister city*. Kesepakatan *sister city* tersebut menjadi gerbang pembuka bagi Banda Aceh dan Samarqand untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, industri kecil dan menengah (UKM), penataan dan pembangunan perkotaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta bidang-bidang lainnya. Samarqand merupakan kota kedua terbesar di Uzbekistan dengan penduduk sekitar 400.000 orang dan merupakan kota yang mempunyai beberapa bangunan bersejarah. Di kota ini juga terdapat makam Imam Bukhori yang dikenal sebagai pengumpul Hadist Sahih Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2001, Samarqand telah ditetapkan sebagai salah satu kota warisan dunia

(*World Heritage City*) oleh UNESCO dengan sebutan *Samarqand-Crossroads of Cultures*.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas dan Kebudayaan Kota Banda Aceh menyangkut para kompetitor dunia internasional dan faktor-faktor eksternal seperti politik dan keamanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyangkut persaingan global (internasional) dalam pemasaran wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada :
 - a. Kondisi-kondisi nyata yang ada. Indikator dalam penentuan ini adalah wisatawan mana yang diharapkan datang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tersebut, waktu berkunjung, asal wisatawan, jumlah wisatawan dan gambaran income per capita.
 - b. Program-program yang dilaksanakan, yaitu apa yang dapat dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, apakah calon wisatawan merespon apa yang dilakukan atau informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan calon wisatawan yang dijadikan target pasar.
 - c. Ketersediaan dari sumber dana. Biaya yang diperlukan untuk membangun komunikasi kepada khalayak sasaran pemasaran objek wisata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada sumber dana dimaksud.
 - d. Segmentasi pasar yaitu berfokus pada jumlah segmen yang sedikit, atau mencari cara untuk berbagi dana dengan program-program lain.
2. Berkenaan dengan faktor politik dan keamanan disebutkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan dan menunjang tingkat keberhasilan kunjungan wisatawan ke suatu negara atau daerah. Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata pada dasarnya sangat rentan terhadap faktor politik dan keamanan dari suatu negara. Faktor politik dimaksudkan adalah kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negeri. Faktor keamanan, yaitu berkenaan

dengan kenyamanan dan keselamatan diri para wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Dikatakan bahwa pembangunan kepariwisataan membutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Dengan stabilitas nasional yang mantap, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan akan dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan.

Sebagaimana sejarah Aceh, fenomena politik dan keamanan di wilayah provinsi Aceh memiliki catatan penting dalam sejarah Indonesia. Konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dengan pihak-pihak lokal telah menjadikan citra provinsi ini menjadi cacat di mata dunia, khususnya para wisatawan mancanegara. Kekhawatiran akan keselamatan jiwa ini, menjadi faktor penghambat berkembangnya pariwisata di Aceh. Terdapat beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk penyelesaian konflik yang terjadi. Kebijakan itu antara lain adalah Ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki, 15 Agustus 2005, di kota Helsinki, Finlandia.

MoU merupakan sebuah babak baru dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh yang telah berlangsung lama. Berdasarkan MoU ini, diterbitkannya Undang-Undang No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini merupakan suatu bentuk kebijakan nasional yang lahir untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai kerangka MoU Helsinki. Undang-undang ini juga mengatur tentang berdirinya partai lokal Aceh. Melalui langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, diharapkan kondusifitas politik dan keamanan Aceh dapat terjaga lebih-lebih pada masa pemilihan umum legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014 yang akan datang. Jikalau Aceh ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawannya, maka situasi politik dan keamanan harus segera dibenahi terlebih dahulu. Pemerintah dan masyarakat Aceh membutuhkan komitmen untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keberlangsungan pembangunan bangsa secara keseluruhan dan pariwisata pada khususnya.

d. Proses Pembuatan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Merumuskan masalah kebijakan publik berarti memberikan arti atau menterjemahkan problema kebijakan secara benar. Harus terdapat persepsi yang jelas tentang masalah yang akan dirumuskan, sebab setiap orang belum tentu memiliki persepsi yang sama walaupun terkadang masalah tersebut sama. Tidak ada satupun kebijakan publik dibuat tanpa berawal dari suatu isu. Bahwa proses pembuatan kebijakan publik apapun pada umumnya berawal adanya *awarenes of problem* (kesadaran akan ada masalah tertentu). Ketika masyarakat secara bersama-sama menyadari adanya suatu masalah terhadap pelayanan publik yang harus dipecahkan dan harus melibatkan pemerintah, maka pada saat inilah muncul apa yang dinamakan masalah publik (*public problem*).

Proses identifikasi dari berbagai isu untuk pembuatan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas (*community Based*). Pendekatan kebijakan berbasis masyarakat merupakan alternatif kebijakan yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Disebut kebijakan sosial indikatif, yaitu kebijakan yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi dari seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial). Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut sebagai kebijakan sosial partisipatif.

Proses pembuatan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya, lingkungan eksternalnya, efektifitas serta efisiensinya dalam mencapai tujuannya. Adapun penanganan berbasis komunitas dilaksanakan melalui penyuluhan dan sosialisasi agar komunitas dan anggota masyarakat pada umumnya peduli pada keberadaan objek wisata. Kepedulian ini bukan saja pada keberadaan objek wisata dimaksud, tetapi lebih jauh lagi adalah mengajak bersama-sama masyarakat

untuk memelihara objek wisata yang ada. Pendekatan ini pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat memahami, menelaah dan sekaligus mengambil inisiatif dalam upaya memecahkan permasalahan pariwisata yang ada secara mandiri. Dengan demikian pengelolaan dan pemeliharaan seluruh objek-objek wisata akan lebih efektif dan efisien sebab pemerintah dan masyarakat berbagi untuk melakukannya.

1. Perumusan Kebijakan Jangka panjang

Perumusan tujuan jangka panjang dan *grand strategy* yang akan diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) disusun sesuai Undang_undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) ini disusun sesuai dengan kareakteristik dari masing-masing daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional. Demikian halnya rencana jangka panjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun sesuai kondisi-kondisi nyata yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat¹⁷¹.

2. Perumusan Jangka Menengah dan Pendek

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK), disusun Rencana Jangka Menengah Kota (RJKM). Rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai implementasinya melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK). Berdasarkan ketentuan ini, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh seluruh kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan kebijakan Kota Banda Aceh¹⁷².

¹⁷¹UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/uu-no-17-tahun-2007-tentang-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2005-2025/>

¹⁷²Peraturan Walikota Banda Aceh No. 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012

3. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi dari opsi-opsi strategis adalah upaya untuk menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan di dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pemilihan strategi haruslah dijalankan dengan hati-hati, sebab pelaksanaannya mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya organisasi. Di samping itu mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi strategis melibatkan banyak sumber daya organisasi sebab pilihan strategis biasanya dihasilkan melalui analisis internal dan analisis eksternal organisasi.

e. Evaluasi Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sebagai dasar untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan organisasi, bagian organisasi dan personil organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi digunakan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

1. Indikator masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah diterapkan.
2. Indikator keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa fisik maupun non fisik. Dengan membandingkan keluaran, dapat dianalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan

sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

3. Indikator hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcomes*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
4. Indikator manfaat (*Benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
5. Indikator dampak (*Impacts*) adalah segala sesuatu yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan¹⁷³.

Pengukuran Kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk:

1. Memastikan bahwa seluruh pelaksana memahami akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati melalui pelaksanaan program-program.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi

¹⁷³Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh 2013

6. Mengidentifikasi tingkat kepuasan para pelanggan apakah sudah terpenuhi melalui penelitian atau wawancara yang dilakukan secara berkesinambungan
7. Membantu memberi pemahaman tentang proses kegiatan instansi pemerintah kepada masyarakat.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam organisasi berkenaan dengan perencanaan program-program telah dilaksanakan secara objektif
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian prestasi organisasi
10. Mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang¹⁷⁴.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, terdapat beberapa tahapan. Pertama adalah tahapan penetapan, kedua pengumpulan data kinerja, dan ketiga adalah cara pengukuran kinerja. Metode Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap serta tepat waktu. Adapun data kinerja diperoleh melalui dua cara, yaitu :

- a. Data internal, yaitu data berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi.
- b. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Hasil dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan, kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dalam merumuskan dan menetapkan pilihan-pilihan strategis untuk program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Seluruh rangkaian dari tahapan ini dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya untuk menghasilkan program-program yang terbaik demi memajukan pariwisata Kota Banda Aceh.

¹⁷⁴*Ibid.*

1.2. Deskripsi Objek Wisata Islami

a. Konsep Wisata Islam

Konsep wisata Islami pada awalnya adalah program kerja Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Terpilih, yaitu Alm. Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc. dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal. Gagasan ini dituangkan dalam Qanun No. 27 Tahun 2007 sebagai visi, misi dan program kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh terpilih yang merupakan janji kepada rakyat Kota Banda Aceh yang harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan diwujudkan selama lima tahun masa jabatan. Adapun visi pembangunannya adalah Banda Aceh Bandar Wisata Islami Indonesia.

Untuk menunjang keberhasilan dari pada visi tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan ke dalam suatu keinginan, tekad dan komitmen bersama yang kuat ke dalam 5 (lima) misi dalam konteks pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan syariat Islam secara kaffah
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
3. Mengembangkan pariwisata yang bernuansa Islami
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, lingkungan hidup dan pemukiman.
5. Mengembangkan perekonomian masyarakat¹⁷⁵.

Dalam penjelasan visi disebutkan :

1. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.
2. Wisata Islami Indonesia dimaksudkan bidang kepariwisataan menjadi pengungkit dan pendorong ((*leverage*)) bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas masyarakat dan pengusaha yang bernilai ekonomis dan bisa menumbuhkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

¹⁷⁵Mawardy Nurdin, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Indomedia Global, 2011) h. 159.

3. Wisata Islami Indonesia dimaksudkan pula bahwa kegiatan kepariwisataan harus tetap dilandasi nilai-nilai Islam dan budaya ke-Acehan sebagai identitas dan kultur masyarakat Kota Banda Aceh.
4. Wisata Islami Indonesia juga bermakna, bahwa siapapun yang berniat untuk melihat atau menikmati jasa pariwisata Islami di Indonesia, Maka keberadaannya ada di Kota Banda Aceh¹⁷⁶.

Adapun tujuan visi tersebut adalah :

1. Membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami.
2. Mengembangkan nilai-nilai kebesaran dan potensi daerah Kota Banda Aceh, sebagai Ibukota Provinsi, Pusat Perdagangan, Pendidikan, dan Budaya.
3. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat untuk memelihara dan menata Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan untuk dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan dan keamanan serta tumbuhnya peluang ekonomi sebagai wujud dari kebesaran Kota Banda Aceh yang Islami.
5. Membangun pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan mampu melayani masyarakat secara optimal melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁷⁷.

Dari apa yang menjadi visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini adalah menjadikan pariwisata sebagai program unggulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, Program wisata di kota Banda Aceh tentunya tidak lepas dari nilai-nilai kultural masyarakat Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus sebagai daerah yang bersyariat Islam, Maka untuk itu pemerintah kota menata dan mengembangkan sektor pariwisata yang bernafas islami menjadi program unggulan yang memiliki nilai jual bagi wisatawan luar.

¹⁷⁶*Ibid.*, h. 161

¹⁷⁷*Ibid.*, h. 162

Dalam mewujudkan visi, misi dan program Pemerintah Kota Banda Aceh ini maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang sangat berkepentingan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Melalui program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini pembangunan dan pengembangan objek-objek wisata saat ini terus dilakukan, sehingga menjadikan Kota Banda Aceh sebagai destinasi pilihan utama dapat tercapai di masa yang akan datang. Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur objek wisata seperti sarana ibadah, telah dilengkapi oleh pemerintah sesuai hasil observasi langsung peneliti. Demikian juga tentang cara berpakaian sesuai kaidah Islam, bagi mereka yang non muslim kalau berkunjung ke Masjid Baiturakhman dan ke Makam Tgk Syiah Kuala.

b. Strategi Pengembangan Wisata Islami di Kota Banda Aceh

Pengembangan objek wisata adalah merupakan aktivitas yang terus-menerus harus dilakukan. Objek wisata harus dikembangkan dan dikelola dengan serius dan berkesinambungan dalam upaya untuk menambah daya tarik, peningkatan pelayanan, serta mempermudah akses untuk menuju objek wisata dimaksud. Pengembangan tentu menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya pemasaran objek-objek wisata dimaksud. Strategi khusus adalah opsi-opsi pengembangan dari *Grand Strategy*. Beberapa strategi khusus yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain adalah:

1. Strategi pengembangan daya tarik wisata melalui objek-objek wisata bencana tsunami seperti Kapal Apung Lampulo (Kapal di Atas Rumah), Museum Tsunami Aceh dan Kapal PLTD Apung. Objek wisata air dengan memanfaatkan Krueng Aceh sebagai pusat wisata air tersebut.
2. Strategi pengembangan promosi, melalui kerjasama dengan negara lain seperti Pemerintah Kota Huddinge (Swedia), Kota Apeldoorm (Amsterdam-Belanda) sebagai Kota kembar (*Sister City*), Kerjasama *Sister City* Banda Aceh-Samarqand, Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (*Center of Tourism Information*).
3. Strategi pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pengembangan diri pegawai melalui studi lanjut?

c. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Islami

Sarana wisata merupakan kelengkapan dari daerah-daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Sarana wisata ini antara lain adalah agen perjalanan, perusahaan transportasi, usaha penginapan, usaha rumah makan. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan dan jembatan, pengangkutan, telekomunikasi, penerangan, air, terminal, sistem perbankan, dan lain-lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini telah mendukung dalam pengembangan sektor wisata Islami di Kota Banda Aceh, antara lain :

1. Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh, memiliki aksesibilitas yang tinggi, baik melalui jalur transportasi darat (bus, mobil pribadi, sepeda motor) maupun jalur transportasi laut (kapal motor, perahu, motor boat), juga transportasi udara. Tiga lintas jalur transportasi itu semuanya ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, juga meningkatkan mobilitas manusia ke daerah tujuan.
2. Ketersediaan akomodasi yang memadai. Saat ini telah tersedia fasilitas hotel berbintang dan losmen, termasuk restoran dan rumah makan, yang akan terus berkembang seiring kemajuan yang telah dicapai oleh Kota Banda Aceh.
3. Pembangunan pusat informasi pariwisata (*information tourism center*) yang bertujuan untuk memudahkan bagi setiap calon wisatawan maupun wisatawan yang sedang berkunjung untuk mendapatkan informasi yang cukup dari seluruh potensi objek-objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh.
4. Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan agen-agen perjalanan sebagai mitra dalam mempromosikan objek-objek wisata. Kerjasama ini dilakukan melalui kunjungan bersama agen-agen perjalanan ke seluruh objek-objek wisata yang ada di Propinsi Aceh difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga pertemuan-pertemuan rutin untuk mencari solusi terbaik pengembangan pariwisata di Provinsi Aceh umumnya, Kota Banda Aceh khususnya.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Islami

Berdasarkan visi Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia, maka titik sentral pembangunan kepariwisataan pada dasarnya adalah masyarakat. Dengan kata lain bagaimana membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa keterlibatan masyarakat adalah faktor yang sangat penting, sebab tanpa itu maka pencapaian visi adalah sesuatu yang mustahil. Seperti yang disebutkan oleh Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal untuk membangun Kota Banda Aceh sebagai kota wisata tentunya memerlukan tenaga yang tidak sedikit baik kesiapan daerah maupun sumber daya manusia sebab sektor parawisata memberikan nilai positif pengembangan daerah yang lebih maju, bisa menambahkan pendapatan daerah dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya kunci keberhasilan program ini adalah adanya dukungan masyarakat sepenuhnya terhadap program pemerintah. Kondisi yang kondusif akan membuat wisatawan nyaman. Masyarakat diminta menumbuhkan sifat keramahan yang sudah melekat di hati, dapat di bangkitkan kembali, sehingga mereka (tamu dan wisatawan) yang datang ke Banda Aceh benar-benar menikmati dan terkesan dihormati.

Demikian pentingnya dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program pengembangan wisata Islam ini, maka pemerintah memandang perlu memberikan bimbingan atau penyuluhan tentang konsep wisata Islami ini kepada masyarakat. Melalui bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan terdapat persepsi yang sama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pencapaian program-program pemerintah dapat berhasil. Sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Drs. T. Saifuddin TA MSi, implementasi qanun-qanun Syariat Islam merupakan tugas berat dan tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan koordinasi dan sinergisitas semua komponen untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, dalam pelaksanaan Syariat Islam di Ibukota Provinsi Aceh, Beliau meminta semua pihak harus berpartisipasi aktif sesuai dengan profesinya masing-masing. Departemen Agama Kota Banda Aceh melalui

penyuluh agama Islam merupakan salah satu pihak terkait dalam menyukseskan implementasi Syariat Islam. Melalui penyuluh agama Islam ini diharapkan untuk dapat menyampaikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga kehadiran penyuluh dapat dirasakan manfaatnya. Tabligh akbar penyuluh agama Islam ini diikuti 321 orang penyuluh agama Islam se- Kota Banda Aceh, dilaksanakan di Mesjid Agung Al-Makmur Lamprit, Kota Banda Aceh.¹⁷⁸

Penyuluhan dalam rangka menegakkan penerapan syariat Islam untuk warga kota Banda Aceh juga dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI). Adapun salah satunya adalah sosialisasi qanun-qanun syariat kepada masyarakat. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Asisten keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan, Drs Ramli Rasyid MSi. Dalam sambutannya mewakili Walikota Banda Aceh, Ramli mengatakan sosialisasi qanun-qanun syariat merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya masyarakat harus tahu apa itu syariat, bagaimana regulasi dan apa sanksinya secara lebih mendalam sehingga mereka memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupan beryariat. “Ketika masyarakat kita telah memahami syariat, regulasinya seperti apa dan sanksinya juga, maka qanun-qanun ini akan terasa mudah di implementasikan dan akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan” ujar Ramli optimis. Sampai saat ini lanjut Ramli, ada 3 Qanun tentang Syariat Islam di Aceh, yaitu qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan syi’ar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya dan qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir dan tindak pidana perjudian. “Ketiga Qanun ini belum semua masyarakat memahaminya, jadi sosialisasi seperti ini merupakan cara yang sangat efektif dan harus dilakukan secara terus-menerus” pinta Ramli.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Mairul Hazami SE dalam kesempatan yang sama mengatakan sosialisasi ini dilakukan kepada 400 warga Banda Aceh, yang berasal dari berbagai elemen masyarakat,

¹⁷⁸<http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=14765&tit=Berita%20Utama%20-%20Implementasi%20Qanun%20SI%20Tugas%20Berat>

diantarnya Para Ketua TP PKK Kecamatan dan Gampong dalam wilayah Banda Aceh, para Muhtasib, para Ketua Pemuda, BKM Masjid, unsur mahasiswa, para pengusaha café dan warung kopi serta pengusaha rumah kecantikan. 400 peserta ini kita bagi dalam 8 angkatan, masing-masing angkatan berjumlah 50 orang. Tujuan sosialisasi, Lanjut Mairul, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap qanun-qanun syariat Islam, membangun partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam, mewujudkan masyarakat yang bersyariat dalam rangka mendukung terwujudnya Banda Aceh sebagai model kota madani dan menggerakkan peran tokoh di masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara benar.¹⁷⁹

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan usaha dan upaya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian penting dalam pelaksanaan konsep wisata Islami. Tidaklah mungkin konsep wisata Islami itu akan dapat terwujud, jika masyarakat sendiri belum memahami dengan benar tentang peraturan-peraturan (qanun-qanun) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain penyuluhan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat agar secara bersama-sama ikut bertanggung jawab atas terwujudnya pariwisata yang Islami.

- e. Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengembangan Wisata Islami
- Kerjasama atau sering disebut pola kemitraan merupakan program strategis yang penting dilakukan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Bahwa tidaklah mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah seyogyanya mampu mendorong dan menggerakkan sektor swasta dan masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam melakukan pembangunan di daerah tersebut. Pola ini diharapkan di samping akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga akan menumbuhkembangkan sektor swasta. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya

¹⁷⁹<http://bandaacehкотamadani.wordpress.com/2013/10/03/sosialisasi-qanun-syariat-islam/>

kemandirian perekonomian daerah, perbaikan infrastruktur pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses kerjasama atau kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah, upaya kerjasama dalam menciptakan peluang pariwisata baru dengan mempromosikan alam dan warisan budaya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata untuk manfaat komunitas lokal. Kerja sama dalam pemasaran pariwisata, berupa kegiatan seperti promosi pariwisata, penyebaran informasi pariwisata, pelaksanaan dan publikasi *survei* di daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan pemerintah. Kerjasama dalam bentuk lain adalah mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pariwisata.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mempromosikan objek-objek wisata Islami juga memandang perlu untuk melakukan pembinaan dan kerjasama dengan pihak swasta. Beberapa program kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banda Aceh antara lain :

1. Kerjasama dengan salah satu stasiun televisi swasta ibu kota Trans TV Jakarta. Acara ini menghadirkan Chef ibu kota yang dikenal dengan beragam resep kreasi, Farah Quinn. Kehadiran Farah Quinn diharapkan menjadi promosi wisata dan budaya untuk memperkenalkan beragam objek wisata alam, wisata sejarah atau peninggalan, wisata tsunami, hingga kuliner Aceh yang menjadi inspirasi bagi Farah Quinn untuk menciptakan kreasi resep masakan baru yang melambangkan kekhasan daerah Aceh. “Ini berkat kerjasama dengan media Trans TV dan pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan masih akan terus berlanjut untuk memperkenalkan kota Banda Aceh, agar tetap baik dan kondusif sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan dan dikenal di manca negara dan nasional” kata Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, disela-sela shooting bersama Farah Quinn di depan Rumoh Aceh.¹⁸⁰

¹⁸⁰<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.379780328776193.92088.255232707897623&type=3>

2. Kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banda Aceh dengan RRI Banda Aceh-Radio Television Malaysia (RTM) dalam mempromosikan daerahnya sebagai Bandar Wisata Islami lewat berbagai kegiatan seperti gelar budaya malam silaturahmi. Berbagai kesenian dan tarian Aceh dan negeri jiran itu ditampilkan di seperti Tari Lingga dan nyanyian berirama melayu serta dimeriahkan penampilan dari Komunitas Drum dan perkusi Aceh (Koda)¹⁸¹.

Menurut Walikota, pariwisata dan budaya menjadi sektor andalan ibu kota Provinsi Aceh itu untuk menarik wisatawan datang sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya berupa promosi, peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku wisata dan pengembangan objek-objek wisata serta menjaga kebersihan lingkungan. Banda Aceh memiliki banyak potensi wisata. Di sini terdapat pantai, sungai dan gunung yang membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Saat ini kita masih berbenah, tambahnya. Namun menurut Mawardy Nurdin, Kota Banda Aceh tidak hanya “menjual” potensi alam tersebut untuk menarik wisatawan melainkan juga suasana dan keunikan lain sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam sebagai daya tarik. Selain itu juga, Kota Banda Aceh memiliki potensi wisata tsunami karena terdapat situs-situs yang menandakan bahwa pernah terjadi musibah tsunami 2004.¹⁸²

3. Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui rapat koordinasi dalam membangun pariwisata Aceh yang lebih baik guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Acara dihadiri sejumlah instansi pemerintah dan pengusaha serta memfokuskan pembahasan pada pengembangan pariwisata Aceh serta mewujudkan Visit Aceh 2013. Rapat ini membahas beberapa hal yang dianggap penting, di antaranya faktor keamanan, promosi wisata, promosi objek-objek wisata, wisatawan yang datang, pelayanan hotel dan restoran, serta promosi paket wisata travel (ASITA), kata Kepala Dinas

¹⁸¹acehimage.com/bandar-wisata-islami-di-banda-aceh/

¹⁸²<http://acehimage.com/bandar-wisata-islami-di-banda-aceh>

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Reza Fahlevi. Diharapkan program ini dapat dilanjutkan, sehingga semua pihak yang berkepentingan saling bekerjasama dan mendukung dalam pembangunan pariwisata di Aceh.¹⁸³

Berdasarkan uraian di atas, konsep wisata Islami dimaksudkan adalah pengembangan kepariwisataan harus tetap dilandasi nilai-nilai Islam dan budaya ke-Acehan sebagai identitas dan kultur masyarakat Kota Banda Aceh. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang bersyariat dalam rangka mendukung terwujudnya Banda Aceh sebagai model kota madani. Upaya ini tentu memerlukan kerjasama melalui peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara benar. Di sisi lain Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong pertumbuhan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

f. Hambatan Pengembangan Wisata Islami

Bahwa potensi obyek wisata dan semua program yang dilakukan dalam upaya mewujudkan sebuah daerah menjadi pilihan utama destinasi wisata pada dasarnya melibatkan banyak unsur di dalamnya dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya-upaya pengembangan kepariwisataan. Manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.

Bahwa konsep pembangunan wisata Islami bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Sejak diberlakukannya Hukum Syariat pada 2001 lalu, selanjutnya lahir Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Aceh dikenal

¹⁸³<http://nelavie.blogspot.com/2012/07/phri-optimis-bangun-pariwisata-aceh.html>

sebagai wilayah yang cukup konservatif dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Beberapa ahli hukum mengatakan, pemberlakuan syariat Islam, merupakan salah satu bentuk otonomi untuk Aceh yang diberikan pemerintah pusat. Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh, direspon oleh pemerintah provinsi dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syari'at Islam di Aceh. Dari Perda-Perda ini selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah kabupaten/kota yang menyangkut tata pelaksanaan syari'at Islam, yang pada gilirannya melahirkan qanun Aceh.

Setelah keluarnya legalitas Pemerintah terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya. Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan model pemerintahan dengan mengadopsi syariat Islam sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karenanya maka tidaklah mudah buat pemerintah Aceh untuk melaksanakannya. Di samping belum siapnya kemampuan sumber daya manusia aparaturnya, di sisi lain disebutkan, belum adanya daerah yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Faktor lain yang paling penting adalah bagaimana mengajak masyarakat dengan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Beberapa kendala yang dapat disebutkan dalam pengembangan wisata Islami, antara lain;

1. Pemerintah kota Banda Aceh mengeluhkan sikap daripada satpam/petugas keamanan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang dinilai terlalu keras terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman. *“Banyak turis yang dilarang masuk karena di anggap tidak berpakaian dengan sopan, ada yang dihambat dengan kasar”* kata Walikota Banda Aceh Alm. Mawardi Nurdin. Mawardi mengatakan pemerintah kota Banda Aceh bersedia menyediakan jilbab atau pakaian muslim bagi turis yang ingin masuk ke perkarangan masjid raya Baiturrahman, dan hal itu sudah diusulkan kepada pengurus masjid raya Baiturrahman meskipun belum

ada jawaban, namun Mawardi mengakui tidak bisa memaksakan hal tersebut, mengingat masjid raya Baiturahman berada di bawah kontrol Pemerintah Provinsi Aceh.¹⁸⁴

2. Potensi dan peluang Aceh untuk mengembangkan diri dalam dunia pariwisata sudah cukup terbuka, namun kenapa tidak bisa berkembang dengan baik? tanya Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Ini karena faktor baik masyarakat maupun pemerintah daerah sama-sama memandang sebelah mata terhadap semua objek wisata yang ada serta wisatawan itu sendiri. "Bahkan yang lebih sinis lagi ada sebagian warga masyarakat masih beranggapan turis atau wisatawan adalah sumber malapetaka yang bisa merusak tatanan, kebiasaan dan syariah," ungkapnya. Menurutnya ada sekitar 113 obyek wisata di Aceh mulai dari objek wisata alam, objek wisata sejarah dan objek wisata bahari seperti Goa Putri Pukes, Benteng Indra Patra Kerkhoff, Rumah Adat, Benteng Jepang dan sebagainya. Kesemua itu memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan. Begitu juga di Sabang dengan objek wisata baharinya, obyek wisata hutan, air terjun serta beberapa objek lainnya. Begitu banyak objek wisata di Aceh tapi penanganannya selalu tidak maksimal. Bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggalkan berbagai bekas yang mestinya juga merupakan objek wisata terlangka dan termahal di dunia. Tapi pada kenyataannya wilayah jangkauan tsunami itu sendiri nyaris tidak diketahui lagi oleh turis luar karena sudah ditaburi bangunan dan rumah-rumah warga. Selain objek wisata tsunami, di Aceh mestinya juga ada dan terpelihara tempat-tempat yang dianggap basis konflik baik masa Operasi Militer (DOM) maupun Darurat Militer (DM), yang kemudian bisa dijadikan objek wisata seperti "Rumoh Geudong, Bukit Tengkorak, Rawa Cot Trieng dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Biro Perjalanan Umum yang hanya sehari-hari bertugas menjual tiket pesawat saja, padahal kita yakin Biro Perjalanan Umum itu akan mampu membawa

¹⁸⁴<http://panteraja.wordpress.com/2012/10/17/hambatan-di-bandar-wisata-islami/hambatan-pemerintah-dalam-pengembangan-wisata-islami-di-aceh>

turis ke seluruh objek wisata yang ada di Aceh. Tetapi itu tidak berani dilakukan.

3. Kalangan warga Banda Aceh tampak berbeda pandangan, terkait pembangunan hotel dan mal dekat bangunan masjid Raya Baiturrahman itu. Kalangan ulama dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) merupakan salah satu organisasi induk yang menentang kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut. Kalangan pemuka agama dari HUDA menolak pandangan yang menyamakan rencana pembangunan hotel di dekat masjid itu sama dengan konsep pembangunan hotel-hotel di kawasan Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Profesor Muslim Ibrahim mengatakan, rencana pembangunan hotel dan mal di kawasan atau di lingkungan masjid Raya Baiturrahman itu dapat mengganggu kehormatan masjid. Prof Muslim menyarankan hotel dan mall tetap dibangun, namun memilih lokasi ditempat lain.¹⁸⁵
4. Terjadinya dekadensi moral di kalangan pemuda dan pelajar di Aceh dari narkoba sampai free sex. Berdasarkan hasil penelitian Abubakar dan Anwar dengan judul Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh (Abubakar dan Anwar 2007), Disebutkan beberapa kasus remaja yang ditemukan akhir-akhir ini, dari narkoba sampai *free sex*, marak terjadi dan sudah dapat dikategorikan sebagai *juvenile delinquency* atau remaja berperilaku menyimpang yang mengandung resiko tinggi (Kartono 1986 : 8-9). Demikian juga halnya dengan Laporan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, Di Banda Aceh sejak tahun 2006 terdapat 132 kasus (42 kasus berat, 90 kasus ringan), tahun 2007 terdapat 149 kasus (47 kasus berat, 102 kasus ringan), tahun 2008 terdapat 103 kasus (22 kasus berat, 77 kasus ringan), tahun 2009 terdapat 91 kasus (21 kasus berat, 70 kasus ringan) dan sampai dengan Februari 2010 terdapat 6 kasus khalwat berat.¹⁸⁶

¹⁸⁵www.republika.co.id › Regional › Nusantara

¹⁸⁶<http://lppm.serambimekkah.ac.id/jurnal/StrategidanHambatanPenerapanQanunKhalwat.pdf>

5. Warga kawasan pantai Wisata Ulee Lheu mengeluh bahwa objek wisata Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa justru telah menjadi lokasi maksiat, khususnya malam hari sehingga warga memutuskan untuk menutup sementara kawasan wisata itu pada malam hari sampai ada solusi yang real dari Pemko Banda Aceh bagaimana menghentikan praktek maksiat di kawasan itu. Adanya praktek maksiat di kawasan Ulee Lheu dianggap sebagai bukti bahwa Bandar wisata yang dikembangkan belum memenuhi kriteria Islami. Hingga hari ini belum terlihat suatu pilot project Islam yang menjadi miniatur kota Banda Aceh sebagai manifestasi Bandar Wisata yang Islami. Jika Bali sebagai Bandar Wisata yang terkenal dengan tradisi dan budaya Hindu-nya yang menjadi daya tarik para wisatawan, maka seharusnya Banda Aceh juga memiliki *pilot project* berbasis Islam yang dikemas dengan rapi dengan harapan bisa menarik minat para wisatawan untuk berkunjung.¹⁸⁷

g. Peran Pemerintah Pusat Dalam Pengembangan Wisata Islami

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 8 (ayat 1 dan 2) disebutkan bahwa ;

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan dari rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara nasional, provinsi dan atau kabupaten/kota. Perencanaan pengembangan pariwisata mensyaratkan kewajiban daerah untuk menyesuaikan pengembangannya secara nasional yang

¹⁸⁷<http://www.acehinstitute.org/id/pojok-publik/sosial-budaya/item/128-akar-permasalahan-bandar-wisata-islami.html>

disusun berdasarkan berbagai isu dan fenomena yang berkembang. Undang-undang ini juga dapat ditafsirkan bahwa peran pemerintah pusat adalah sebagai regulator atau menyiapkan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengembangan pariwisata, menjamin terciptanya iklim dan kondisi yang aman pada seluruh objek-objek wisata serta bertanggung jawab dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya dan pariwisata internasional pada khususnya.

Tugas pokok Pemerintah Daerah dalam rangka usaha pengembangan pariwisata adalah membantu dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Mengadakan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di daerahnya. Mengadakan prasarana-prasarana yang termasuk kewajibannya, yang kesemuanya dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya dan pariwisata dalam negeri pada khususnya.

Dari apa yang diuraikan di atas, fenomena-fenomena yang terjadi adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pengembangan wisata Islami. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau pun lembaga dan instansi lain senantiasa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Program pembinaan maupun penyuluhan melalui sosialisasi qanun maupun program terus menerus dilakukan agar terwujudnya pelaksanaan syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Bahwa kesuksesan pencapaian Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami bukan merupakan tanggungjawab Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh semata, tetapi menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua pihak. Kota Banda Aceh dengan kebesaran sejarahnya, mewariskan budaya (*culture heritage*) Islami dan adat-istiadat yang mempesona (*enhance costume*). Kebesaran ini tentu harus dipelihara dan dilestarikan untuk kehidupan sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

2. Temuan Utama

Model Perencanaan Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pemasaran Objek Wisata Islami di Kota Banda Aceh

a.. Perencanaan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Dalam Pemasaran Objek Wisata Islami

Menganalisis masalah berarti berusaha untuk mengetahui isu apa yang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah dimaksud. Metode yang dipilih harus sesuai dan dapat menjawab semua permasalahan secara tepat dan efektif. Beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas adalah bagaimanakah mengidentifikasi adanya permasalahan yang muncul, mengapa permasalahan itu menarik bagi perencana, apa dan bagaimana perencanaan akan dibuat untuk memecahkan masalah tersebut, dan adakah halangan dan rintangan di dalam merumuskan masalah.

Perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi diawali melalui pendekatan berbasis komunitas (*community Based*). Model pendekatan ini sesuai dengan tujuan visi Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami. Komunitas dalam hal ini adalah mereka yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan objek wisata. Komunitas ini dapat berupa kelompok pelaku seni dan budaya, pelaku wisata, pemerhati maupun masyarakat di sekitar objek wisata. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hasnanda Putra, ST, MM Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh,

”Bahwa perencanaan terhadap masalah yang akan disusun dalam program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas (*community Based*), yaitu dengan mendengarkan langsung dari mereka apa masalah yang dihadapi, baik melalui wawancara di lapangan, diskusi maupun rapat musyawarah dengan mengundang mereka”.¹⁸⁸

¹⁸⁸Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan Tanggal 14 April 2014

Pendekatan berbasis komunitas merupakan alternatif kebijakan yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik dari wilayah tersebut. Komunitas mempunyai hak dilibatkan untuk menyusun perencanaan pengelolaan wilayahnya. Pendekatan ini adalah upaya untuk dapat memahami, menelaah dan sekaligus mengambil inisiatif memecahkan permasalahan pariwisata yang ada secara mandiri. Untuk penyusunan program kerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), perencanaan masalah biasanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan/desa.

Pemerintah kota Banda Aceh sangat sadar pelaksanaan syariat Islam harus melibatkan semua komponen masyarakat, secara khusus pada daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Kesadaran berperilaku sesuai ketentuan yang tertuang dalam syariat ini harus terus menerus disosialisasikan sehingga Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami dapat tercapai. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam menunjang kegiatan perencanaan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan objek-objek wisata dimaksud.

“kita berharap dengan semakin tingginya perhatian masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu program-program kita sekaligus tumbuhnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga objek-objek wisata yang ada”. Sebut Bapak Hasnanda.¹⁸⁹

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Zainal Arifin S.Sos, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh,

“Kita berharap bahwa di masa yang akan datang pengelolaan objek wisata diserahkan kepada masyarakat tidak hanya oleh pemerintah. Menurutnya seyogianya objek wisata dikelola oleh masyarakat, namun dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan baik. Jadi peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penggerak dari pariwisatanya adalah kelompok-kelompok sadar wisata yang telah dididik dan dilatih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”.¹⁹⁰

¹⁸⁹Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan Tanggal 14 April 2014

¹⁹⁰Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

Proses mendengarkan langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan objek wisata maupun pemasarannya merupakan tahap awal dari pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara langsung maupun melalui rapat terstruktur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui bidang terkait. Data-data yang dikumpulkan biasanya bersifat menyeluruh, yakni melalui pelaku wisata seperti agen perjalanan, pemilik hotel, pengusaha transportasi, pengusaha restoran, kelompok masyarakat pemerhati wisata dan juga masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Para *stakeholders* akan menyampaikan berbagai masalah yang terjadi dan memberikan sumbang saran serta juga kritik kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seperti disebutkan Bapak Hasnanda Putra,

“Biasanya proses komunikasi antara kami dengan para stakeholder berlangsung secara informal, yaitu berdiskusi secara santai di lokasi-lokasi objek wisata. Topik pembicaraan adalah berkaitan dengan keadaan objek wisata, penataan objek wisata masalah keamanan dan kenyamanan maupun masalah pemasaran objek wisatanya (kunjungan wisatawan) melalui usulan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan”.¹⁹¹

Data yang diperoleh ini kemudian diklasifikasi oleh bidang terkait dengan terlebih dahulu memilah dan memilihnya sesuai tingkat kepentingannya. Walaupun tidak melalui sebuah survey yang mendalam, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggap bahwa data yang diperoleh ini sudah cukup mewakili dari masalah-masalah yang ada. Jika dianggap perlu, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap masalah yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Proses pengumpulan data tahap awal ini kemudian dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya yaitu proses analisis masalah.

“Pada hari selasa setiap minggunya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan rapat rutin antar bidang untuk membahas hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian. Rapat ini biasanya dipimpin oleh Kepala Dinas”. Sebut Bapak Hasnanda Putra, ST, MM¹⁹²

¹⁹¹Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan Tanggal 14 April 2014

¹⁹²Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan Tanggal 14 April 2014

Proses analisis masalah dilakukan melalui rapat antar bidang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rapat ini biasanya dipimpin oleh Kepala Dinas dan rutin dilaksanakan pada hari selasa setiap minggunya. Data yang diperoleh langsung di lapangan, kemudian disesuaikan dengan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penyesuaian ini dianggap penting berdasarkan perencanaan yang telah disusun masing-masing bidang, selain juga menyangkut anggaran yang tersedia. Proses analisis masalah ini merangkum keseluruhan aspek-aspek yang kelak akan dijadikan panduan bagi program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karenanya proses ini membutuhkan pengkajian yang mendalam dan komprehensif dari seluruh bidang dan seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum diajukan sebagai rencana operasional pada tahun anggaran.

Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia, tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dinas yang sangat berkepentingan terhadap program ini, membutuhkan banyak program-program nyata untuk mendukungnya. Sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menerima informasi yang datang dari masyarakat berkenaan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Beberapa kegiatan untuk mendukung visi dan misi yang telah dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat antara lain adalah Penyelenggaraan Festival Peunayong dan Festival Krueng Aceh, Putro Phang Art and Music Weekend Show, International Geulayang Tunang, Aceh Coffee and Food Festival dan Piasan Seni Banda Aceh.

Tahap selanjutnya dari perencanaan masalah ini adalah pembuatan keputusan tentang masalah-masalah apa sesungguhnya yang harus mendapat perhatian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam tahapan ini beberapa alternatif dari masalah yang telah dianalisis kemudian disusun sesuai urutan prioritasnya. Dari beberapa alternatif tersebut, ditetapkan mana masalah yang harus mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti. Penetapan masalah ini selanjutnya diserahkan kepada bidang dan seksi sesuai tugas dan pokok

fungsinya masing-masing. Pembuatan keputusan ini menjadi penting untuk selanjutnya dikomunikasikan dalam pemasaran objek wisata Islami.

“keseluruhan masalah kemudian diklarifikasi oleh masing-masing bidang untuk ditetapkan mana yang perlu mendapat perhatian. Kemudian masing-masing bidang akan mempelajari lagi masalah tersebut sebelum diajukan sebagai rencana program. Meskipun telah disetujui melalui rapat, keseluruhan masalah tersebut kemudian dibahas lagi bersama dengan bagian keuangan sebelum ditetapkan menjadi rencana program dinas”. Lanjut Bapak Hasnanda.¹⁹³

Masalah-masalah yang berkenaan dengan pemasaran objek wisata Islami seperti yang terangkum dari hasil wawancara adalah mengidentifikasi dan menggali potensi dari pada objek-objek wisata yang ada. Langkah ini harus dilakukan dengan cermat agar dapat mengetahui secara keseluruhan mengenai kelebihan-kelebihan dari daya tarik wisata yang dimiliki. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga saat ini telah membuat daftar-daftar objek wisata yang layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Langkah ini selanjutnya diikuti dengan pendataan berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti akomodasi, transportasi, restoran, pasar seni, kerajinan rakyat dan yang lainnya.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk keindahan dan kenyamanan objek-objek wisata terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Upaya lain adalah penataan ulang objek wisata secara fisik agar keindahan dan kebersihannya terjamin sehingga menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Eddy Satiadi Irawan, ST, MT Kepala Seksi Potensi, Objek dan Kawasan Wisata.

“Program yang kita kembangkan sampai saat ini adalah penataan seluruh objek dan kawasan wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Penataan dimaksudkan adalah upaya mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut kemudian dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Penataan ini diharapkan secara perlahan akan dapat memanfaatkan seluruh potensi-potensi objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh”.¹⁹⁴

¹⁹³Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan Tanggal 14 April 2014

¹⁹⁴Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terus ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat setempat. Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata di daerah yang kurang berkembang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam upaya menggerakkan pembangunan mengejar ketertinggalan yang dialami masyarakat tersebut. Kunjungan wisatawan ini diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitar objek-objek wisata, melalui jenis usaha yang dilakukan seperti usaha makanan dan minuman atau pakaian dan kerajinan tangan.

Selain dari pembangunan fisik, pembangunan rohani juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sadar wisata. Sebagai contoh adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam dan melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat. Untuk kegiatan sadar wisata antara lain membentuk dan melatih 4 (empat) kelompok sadar wisata guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kelompok sadar wisata itu adalah Apong Gampong (Desa Punge Blangcut), Ceurucok Ulee Lheu, Kampung Pande dan Kelompok Sadar Wisata Lampulo.

Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas utama pembangunan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan. Namun disadari tidaklah mudah menjadikan Aceh sebagai destinasi pilihan kunjungan wisata, sebab banyak faktor yang harus dipenuhi. Selain sarana dan prasarana, kenyamanan dan keamanan wisatawan pun harus diperhatikan. Faktor lain adalah pariwisata membutuhkan waktu yang panjang untuk berkembang. Menyadari hal itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penetapan tujuannya senantiasa bersikap realistis sesuai kondisi-kondisi dimaksud.

Dalam upaya pencapaian tujuan di atas, saat ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan membebaskan setiap wisatawan untuk berkunjung ke seluruh objek-objek wisata yang ada tanpa dikenai bayaran (retribusi). Melalui cara ini diharapkan para wisatawan akan semakin mengetahui .potensi-potensi objek wisata yang dimiliki Kota Banda Aceh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasrul Sani, SE Kepala Seksi Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

“Saat ini pariwisata di Kota Banda Aceh masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu maka tujuan yang ditetapkan lebih diprioritaskan pada program-program promosi untuk mengenalkan pariwisata Kota Banda Aceh ke wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jadi kita belum banyak berbicara tentang berapa perkiraan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih kepada mengenalkan objek-objek wisata yang ada”.¹⁹⁵

Berdasarkan apa yang telah disampaikan, sasaran dalam pemasaran pariwisata belum berorientasi pada pencapaian target jumlah wisatawan yang diharapkan berkunjung sebagaimana mestinya. Pemasaran pariwisata lebih kepada mengenalkan potensi objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih berfungsi sebagai fasilitator atau coordinator dalam setiap kunjungan wisatawan. Seperti dikatakan Bapak Hasrul Sani,

“Kami lebih banyak bertindak sebagai koordinator dan fasilitator terhadap tamu-tamu yang datang berkunjung. Sebagai koordinator dimaksudkan adalah membantu para stakeholders seperti agen perjalanan maupun hotel-hotel. Sebagai fasilitator misalnya kami membantu mereka, kalau mereka ingin berkunjung pada objek-objek wisata tertentu atau mereka ingin menyaksikan pertunjukan seni tertentu”.¹⁹⁶

Penjelasan ini dapat diartikan bahwa pemasaran pariwisata di Kota Banda Aceh lebih difokuskan pada upaya-upaya promosi untuk mengenalkan keberadaan objek-objek wisata yang ada. Bahwa Pemerintah kota Banda Aceh saat ini berkonsentrasi untuk memulihkan sektor perekonomian, khususnya melalui

¹⁹⁵Hasil Wawancara, Tanggal 11 Pebruari ,Tanggal 28 Pebruari dan Tanggal 14 April 2014

¹⁹⁶Hasil Wawancara, Tanggal 11 Pebruari, Tanggal 28 Pebruari dan Tanggal 14 April 2014

pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Dalam rangka pembangunan dan pengembangan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh mempersiapkan fasilitas fisik, misalnya pembangunan jalan baru, perbaikan taman kota, perbaikan pasar, pembangunan hotel berbintang, dan sebagainya. Melalui kebijakan ini diharapkan kenyamanan dan ketenangan para wisatawan akan terpenuhi dan satu hal yang paling penting bahwa daerah ini aman untuk dikunjungi. Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang jumlah wisatawan akan meningkat, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian Kota Banda Aceh.

Perencanaan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan proses yang panjang dan kompleks. Kegiatan ini dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, analisis masalah dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar, apalagi menyangkut perilaku dan budaya masyarakat. Terdapat beberapa rintangan dan hambatan dalam perumusan masalah yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan masalah anggaran yang tersedia. Bahwa tidak semua usulan program dapat dipenuhi, bukan semata-mata oleh karena faktor prioritas, namun terkadang lebih oleh karena minimnya alokasi anggaran untuk itu. Faktor lain adalah belum adanya kesamaan pendapat antara pemerintah, masyarakat dan para ulama dalam menyusun konsep pembangunan dan pengembangan pariwisata.

- b. Perencanaan khalayak sasaran komunikasi dalam pemasaran objek wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Perencanaan khalayak sasaran merupakan tahap yang sangat menentukan pada arah dan tujuan perencanaan. Tahap ini menganalisis segmen masyarakat sasaran yang ada, baik dari segi sosiodemografis (pendidikan, usia, jenis kelamin, etnis, kepercayaan, bahasa, pekerjaan) dan juga dari segi psikografis (aspirasi, kesenangan, dan kebiasaan-kebiasaan). Pemahaman komprehensif mengenai tatanan masyarakat ini diperlukan untuk menentukan khalayak sasaran dan format kegiatan yang sesuai dengan keinginan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dan kebutuhan khalayak sasaran. Perencanaan khalayak sasaran adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan khalayak sasaran dalam pemasaran objek wisata Islami. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu untuk menetapkan urutan prioritas kategori khalayak sasaran. Siapa yang menjadi sasaran utama (sasaran primer) dan siapa yang menjadi sasaran antara (sasaran sekunder). Masalah yang dikaji dalam bagian ini adalah siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan, bagaimana karakteristik dari individu atau kelompok, atau warga khalayak yang akan dijadikan sasaran, apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya.

Sesuai hasil wawancara disebutkan, bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menetapkan siapa yang menjadi khalayak sasaran berpedoman bahwa setiap calon wisatawan yang dijadikan sebagai target pasar memiliki karakternya sendiri. Oleh karenanya perlu diseleksi dengan melakukan identifikasi. Dilihat dari sisi daerah tujuan wisata, wisatawan mana yang diharapkan datang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tersebut, waktu berkunjung, asal wisatawan, jumlah wisatawan dan gambaran *income per capita*. Faktor lain juga yang diperhatikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah apa yang dapat dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, apakah calon wisatawan merespon apa yang dilakukan atau informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan calon wisatawan yang dijadikan target pasar itu. Sebagaimana dikatakan Bapak Said Fauzan, SSTP, MA, Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh,

“Segmentasi khalayak perlu kami lakukan untuk melihat siapa sebenarnya yang menjadi pangsa pasar kami. Dengan mengetahui siapa yang menjadi target pemasaran, tentu ini akan memudahkan untuk menyusun program promosinya. Faktor lain pentingnya segmentasi khalayak ini adalah kita menghindarkan program-program yang kita anggap tidak tepat sehingga menghindarkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.”¹⁹⁷

Selain dari faktor di atas, dalam menentukan khalayak sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempertimbangkan ketersediaan sumber dana.

¹⁹⁷Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya komunikasi kepada sasaran pemasaran objek wisata Islami bukanlah sedikit. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan berpedoman pada sumber dana dimaksud. Karena faktor sumber daya terbatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memandang perlu untuk melakukan segmentasi khalayak. Segmentasi pasar ini dianggap lebih tepat untuk berfokus pada jumlah yang segmen yang sedikit, atau mencari cara untuk berbagi dana dengan program-program lain.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Kebijakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan khalayak sasaran lebih kepada wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Kota Banda Aceh. Kebijakan ini didasarkan pada penilaian kunjungan wisatawan untuk jangka waktu tertentu, meskipun tidak mengabaikan khalayak sasaran lainnya. Sesuai sebaran jumlah wisatawan misalnya, antara tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa wisatawan Malaysia sebagai jumlah yang terbanyak berkunjung ke Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu maka wisatawan Malaysia menjadi sasaran utama (sasaran primer) di dalam perencanaan khalayak sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. Jumlah wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Aceh adalah sebanyak 7.998 orang atau 67,93 % dari jumlah keseluruhan wisatawan mancanegara yang berkunjung sepanjang tahun 2012. Kemudian berturut-turut Inggris, Amerika Serikat, Australia, Perancis, Singapura, Jerman, Cina, Belanda dan Thailand. Menurut keterangan Bapak Said Fauzan, SSTP, MA,

“Berdasarkan hasil pengamatan kami, saat ini wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Kota Banda Aceh adalah wisatawan yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, khususnya dari Malaysia. Oleh karena itu maka dalam program promosinya kami berfokus pada wisatawan yang berasal dari Malaysia. Memang kami juga melakukan program promosi untuk wisatawan-wisatawan dari negara-negara lain, namun kami lebih fokus pada jumlah wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Kota Banda Aceh yakni dari Malaysia dengan memperhatikan potensi unggulan yang dimiliki”.¹⁹⁸

¹⁹⁸Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Iqbal, S.STP, Kepala Seksi Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata,

“Kita memang lebih banyak menjalin kerjasama dengan Malaysia, sebab jumlah wisatawan yang berkunjung lebih banyak dibanding dari negara-negara lain. Kerjasama seperti Program Fam Trip dan Table Top dan kerjasama RRI Banda Aceh-Radio Television Malaysia (RTM), tujuannya adalah dalam rangka mempromosikan objek-objek wisata Banda Aceh ke tingkat internasional”.¹⁹⁹

Kebijakan lain dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan khalayak sasaran adalah lembaga dan kelompok yang menjadi mitra dalam pemasaran objek-objek wisata. Disadari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa dengan keterbatasan dana tentu tidaklah mungkin untuk menjangkau semua pihak-pihak yang menjadi pelaku wisata. Oleh karenanya salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui konsep pengembangan jaringan. Pola pengembangan jaringan pariwisata memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis.

“Konsep kerjasama BASAJAN (Banda Aceh-Sinabang-Jantho) merupakan kerjasama antar pemerintah daerah. Tujuannya adalah bagaimana kami dapat saling bekerjasama dalam mempromosikan objek-objek wisata di ketiga daerah melalui penjualan paket-paket wisata. Kerjasama ini juga mencakup mengadakan event-event secara bersama-sama untuk lebih mengenalkan objek-objek wisata dimaksud kepada dunia internasional”, seperti dijelaskan Bapak Muhammad Iqbal, S.STP.²⁰⁰

Pengelolaan pariwisata sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada kebersamaan (*mutuality*). Melalui pola pikir ini diupayakan agar dapat meningkatkan kerjasama antara jenis-jenis usaha pariwisata sebagai suatu kekuatan bersama yang bersinergi dalam membangun pariwisata daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Said Fauzan, SSTP, MA

“Konsep pengembangan jaringan ini adalah kerjasama dengan pihak-pihak yang kami anggap dapat membantu kami dalam melakukan event-event. Misalnya kelompok stakeholder perjalanan

¹⁹⁹Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

²⁰⁰Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

yang berada di daerah maupun di Jakarta. Melalui mereka kita menghimpun event-event nasional dan internasional dengan menghadirkan banyak perwakilan dari negara-negara lain untuk berpartisipasi, misalnya program Visit Banda Aceh Year. Selain banyaknya partisipasi Negara-negara lain, tentu ini juga akan menghemat biaya pelaksanaannya. Rasanya sulit bagi kami seandainya kalau mengundang langsung negara-negara yang bersangkutan untuk berpartisipasi pada event-event yang kami adakan karena besarnya anggaran dana yang harus tersedia”.²⁰¹

Kelompok sasaran lain dari perencanaan khalayak adalah kelompok-kelompok sadar wisata, baik yang dibina oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun kelompok-kelompok sadar wisata yang tumbuh dan berdiri atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dengan konsep pembangunan pariwisata berbasis komunitas maka diharapkan peran serta masyarakat secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal. Pemberdayaan ini dilakukan untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya dan pada gilirannya dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainal Arifin, S.Sos,

“Kelompok-kelompok sadar wisata yang telah kami bina ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memberikan informasi dan mengidentifikasi wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerah mereka, sekaligus menjadi pemandu para wisatawan untuk mengenalkan daerahnya secara lebih mendalam. Melalui mereka kami mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan objek-objek wisata yang ada”.²⁰²

Tahapan lain yang juga sangat penting dalam perencanaan khalayak sasaran pemasaran objek wisata Islami berkenaan dengan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata, fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata. Oleh

²⁰¹Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014.

²⁰²Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seyogyanya menyampaikan informasi kepada masyarakat dan para pelaku wisata tentang sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

“Apa yang menjadi program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran, senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui media cetak, media elektronik, spanduk ataupun baleho. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui apa yang menjadi program-program Dinas dan selanjutnya diharapkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program dimaksud”, sebut Bapak Hasnanda, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran”.²⁰³

Disadari oleh Dinas, bahwa proses komunikasi publik yang berlangsung dengan efektif dan efisien akan mampu menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan memperoleh hasil yang lebih baik jika masyarakat ikut aktif di dalamnya. Oleh karena itu selain masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang menjadi sasaran pembangunan, di sisi lain masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sesuai dengan kepentingannya.

Perencanaan khalayak sasaran adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengkategorisasikan khalayak sasaran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu untuk menetapkan urutan prioritas kategori khalayak sasaran, siapa yang menjadi sasaran utama (sasaran primer) dan siapa yang menjadi sasaran antara (sasaran sekunder). Pola penanganan masalah berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, diharapkan akan menghasilkan alternatif penyelesaian masalah melalui pendekatan tradisi lokal dengan memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal.

- c. Perencanaan tujuan untuk dikomunikasikan dalam pemasaran objek wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Otonomi daerah pada prinsipnya adalah proses mendekatkan

²⁰³Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari dan Tanggal 14 April 2014

pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama ikut serta dalam proses pembangunan. Makna lain otonomi adalah memberikan kesempatan pada daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi memberi peluang untuk menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan ini juga berlaku bagi pembangunan sektor kepariwisataan. Masalah yang dikaji pada pertanyaan ini adalah adakah gambaran hasil final yang hendak dicapai oleh lembaga, bagaimana merumuskan tujuan secara spesifik dan persis, adakah gambaran perubahan yang dapat diukur (*measurable*) dan dapat dilihat (*observable*), bagaimana menyatakan standar kualitas atau kriteria sebagai patokan mengukur keberhasilan.

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses perencanaan tujuan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dikomunikasikan dalam pemasaran objek wisata islami, draft awalnya disinkronisasikan dengan usulan-usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Draft ini berisi jawaban terhadap isu-isu yang muncul, kebutuhan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dalam satu tahun ke depan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data ini diperoleh langsung dari para pelaku wisata, pemerhati wisata dan masyarakat yang berdiam di sekitar objek wisata. Setelah melalui analisis dan pertimbangan yang matang, seluruh data ini kemudian dirangkum dan ditetapkan berdasarkan urutan prioritasnya sebagai usulan dari program tahunan Dinas.. Selanjutnya usulan ini dibawa

dalam Rapat Kerja Pembangunan Kota (RKPK). Seperti dijelaskan Bapak Hasnanda Putra,

“Sebagaimana halnya pembuatan program usulan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyusunan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Melalui musyawarah ini kita mendapatkan informasi-informasi awal tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi serta isu-isu penting apa yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan ini menjadi sangat penting sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.”²⁰⁴

RKPK ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) merupakan dokumen perencanaan daerah yang berlaku untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPK merupakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai dokumen resmi pemerintah, RKPK mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPK juga memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, arah dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah dan rencana prioritas pembangunan, termasuk di dalamnya gambaran tentang isu strategis serta masalah mendesak yang segera perlu ditangani dan diselesaikan.

“Penyusunan rencana kerja tahunan bidang promosi dan pemasaran mengacu pada perencanaan kerja yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK). Melalui rencana ini maka seluruh program kegiatan yang telah diurutkan sesuai prioritasnya kemudian diajukan untuk kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan ini biasanya mengacu pada kegiatan anggaran tahun berjalan sebagai pertimbangan mana yang dilanjutkan atau mana yang tidak”.sebut Bapak Hasnanda.²⁰⁵

²⁰⁴Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari dan Tanggal 14 April 2014

²⁰⁵Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari dan Tanggal 14 April 2014

Penyusunan RKPK Banda Aceh Tahun 2013 mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012 –2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2012 dan diharapkan menjadi salah satu dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Pertimbangan lain dalam penyusunan RKPK adalah dengan memperhatikan perkembangan kondisi-kondisi terakhir tahun 2012 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2013. Prioritas pembangunan tahun 2013 disesuaikan dengan adanya penancangan Tahun Kunjungan Kota Banda Aceh atau Visit Banda Aceh Year, dan juga untuk mempercepat pencapaian Visi Kota Banda Aceh.

Analisis terhadap kondisi terakhir pada tahun anggaran berjalan seperti yang disebutkan, merupakan faktor yang sangat penting. Kondisi ini paling tidak telah memberi gambaran dari hasil program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di samping itu, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator penting untuk melihat adakah gambaran perubahan yang dapat diukur (*measurable*) dan dapat dilihat (*observable*). Jumlah kunjungan wisatawan, pembangunan infrastruktur pada objek-objek wisata dan tumbuhnya kelompok-kelompok sadar wisata kiranya dapat dijadikan sebagai ukuran dari adanya hasil program yang telah dilaksanakan. Faktor lain adalah pelaksanaan syariat Islam yang semakin baik juga dapat dijadikan sebagai ukuran telah berhasilnya sebuah program.

Untuk yang dapat dilihat (*observable*), berdasarkan hasil pengamatan peneliti di 3 (tiga) lokasi objek wisata Islami yaitu Kompleks Makam Tgk. Dianjong dan Tgk Dikandang dan Masjid Baiturrahman, prasarananya telah dilengkapi dengan baik, antara lain adalah pembangunan kembali Kompleks Makam Tgk Dianjong setelah musibah Tsunami dan pembangunan Masjid Tgk Dikandang yang terletak di Gampong Pande Kec. Kutaraja. Pembangunan ini untuk memudahkan para peziarah melaksanakan kewajiban ibadahnya. Untuk Masjid Baiturrahman saat ini telah dilengkapi dengan Counter Jubah, yaitu penyediaan pakaian muslim/muslimah bagi orang-orang non muslim yang

berkunjung ke kompleks masjid. Pembangunan ini juga menjadikan ciri dari objek wisata Islami.

Untuk kelompok sadar wisata sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Zainal Arifin, S.Sos, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telah berkembang dengan baik. Semula Kelompok sadar wisata ini dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mendapat bantuan dana langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini kelompok ini tetap eksis dan telah dapat menghidupi dirinya sendiri melalui usaha pemancingan dan penyewaan boat-boat kepada para pengunjung yang datang.²⁰⁶

Dijelaskan oleh Bapak Hasnanda Putra, bahwa tidaklah mudah untuk mencapai keberhasilan program-program yang telah direncanakan. Pengalaman-pengalaman yang dilihat di lapangan memberi gambaran bahwa apa yang direncanakan tidak semudah ketika diimplementasikan. Bahwa ada banyak faktor terkadang menyebabkan sebuah program tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Pariwisata adalah sebuah kegiatan yang menyangkut banyak aspek, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi urusan instansinya semata melainkan butuh kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Namun menurutnya adanya kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur kepariwisataan dan dukungan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan dapat dijadikan kriteria sebagai patokan mengukur adanya keberhasilan dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

”Ada banyak faktor terkadang menyebabkan sebuah program tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Pariwisata adalah sebuah kegiatan yang menyangkut banyak aspek, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi urusan instansinya semata melainkan butuh kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Sebagai contoh misalnya, konflik-konflik partai lokal di Aceh yang terjadi menjelang Pemilu ini, tentu menjadi perhatian masyarakat, apalagi terkadang media massa menggambarkannya terlalu berlebihan. Tentu ini memberi kesan yang tidak baik terhadap kondisi keamanan di Aceh.”²⁰⁷

²⁰⁶ Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

²⁰⁷ Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014 dan 14 April 2014

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penelitian, 3 (tiga) faktor internal seperti aksesibilitas yang baik, ketersediaan akomodasi yang memadai, adanya pusat informasi dari pariwisata telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk faktor eksternal seperti ketersediaan anggaran, kerjasama dengan biro perjalanan umum dan sikap masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pemasaran pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Said Fauzan, terbatasnya anggaran untuk promosi sehingga ada beberapa bentuk kerjasama dan kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, dialihkan atau bahkan dibatalkan. Misalnya adalah pembatalan kerjasama pemasangan iklan di inflight magazine airline pada perusahaan Garuda karena dianggap terlalu mahal.²⁰⁸

Faktor dukungan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menyukseskan program pemasaran pariwisata. Sebagaimana telah diuraikan bahwa faktor dukungan masyarakat ini adalah melalui menjaga kondusifitas dari objek-objek wisata sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman ketika berkunjung. Namun acap kali juga masyarakat menjadi penghambat pemasaran wisata dimaksud. Seperti misalnya warga kawasan pantai Wisata Uleu Lheu mengeluh bahwa objek wisata Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa justru telah menjadi lokasi maksiat, sehingga warga memutuskan untuk menutup sementara kawasan wisata itu. Realita ini sangat kontras dan paradoks dengan status Banda Aceh yang ingin menjadikan dirinya sebagai Bandar Wisata Islami.

- d. Perencanaan pendekatan komunikasi untuk mencapai sasaran pemasaran objek wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Perencanaan pendekatan komunikasi merupakan langkah penting dalam tahap implementasi kebijakan untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sebuah rencana yang baik belum tentu dalam pelaksanaannya memperoleh hasil yang baik, karena demikian banyak faktor yang tidak terkontrol bisa mempengaruhinya. Faktor-faktor demikian harus menjadi perhatian oleh para pembuat kebijakan dan kemampuan meramalkan perubahan-perubahan yang akan terjadi menjadi penting dimiliki oleh mereka para pembuat kebijakan. Oleh karenanya, sebuah perencanaan diupayakan untuk senantiasa tanggap dan

²⁰⁸Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari 2014, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014.

menyesuaikan diri dengan perkembangan di dalam masyarakat maupun berbagai sumber daya yang menunjangnya. 2 (dua) persoalan penting dalam proses ini, apakah pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perencanaan menyeluruh (*holistic*), atau pendekatan perencanaan terpilah.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dokumen, pendekatan komunikasi untuk mencapai sasaran pemasaran wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan baik secara perencanaan menyeluruh (*holistic*) maupun perencanaan secara terpilah namun dengan pendekatan yang realistis. Perencanaan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, disusun dalam 3 (tiga) tahapan. Pertama adalah Perencanaan Jangka Panjang, kedua adalah Perencanaan Jangka Menengah dan terakhir adalah Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan program kerja Pemerintah Kota Banda Aceh ini sesuai Undang_undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Berpedoman pada Undang-undang dan peraturan lainnya, maka Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 16 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027. Qanun ini diharapkan sebagai acuan resmi dan pedoman yang berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPR Kota Banda Aceh, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui potensi dan kondisi riil serta proyeksi arah pembangunan di Kota Banda Aceh pada masa akan datang. Berdasarkan Qanun No. 16 Tahun 2007, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012. Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017. Selanjutnya pada pasal 8 (butir c dan d) disebutkan RPJPK sebagai kerangka dasar bagi Pemerintah Kota dalam menyusun arah kebijakan umum APBD dalam setiap tahunnya dan kerangka dasar bagi satuan kerja perangkat kota (SKPK) dalam menyusun kebijakan arah pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota sebagai sebuah rencana pembangunan yang bersifat prediktif dan indikatif yang meliputi prediksi-prediksi capaian kinerja pembangunan dan pagu indikatif anggaran di bidang agama (Syariat Islam), ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pelayanan publik, politik, hukum, pemerintahan dan penataan kota sebagaimana wujud tugas khadimul ummah yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Walikota/Wakil Walikota. Di dalam maksud dan tujuan penyusunan RPJM Kota Banda Aceh adalah untuk mendesign *output* dan *outcomes* yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun ke depan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas dan kualitas, sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Berkenaan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata disebutkan dalam RPJM Kota Banda Aceh salah satu isu yang menjadi *grand strategynya* adalah pembangunan Infrastruktur perkotaan yang mendukung pariwisata. Pembangunan dimaksud adalah :

1. Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, Fasilitas umum dan transportasi;
2. Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;
3. Kota Banda Aceh bebas dari sampah dan seluruh sampah diolah menjadi produk bernilai tambah;
4. Kota Banda Aceh memiliki sistem mitigasi bencana yang efektif.

Upaya mewujudkan isu strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh, maka pada setiap Rencana Pembangunan Tahunan Kota, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) pembangunan infrastruktur pariwisata senantiasa dianggarkan. Pembangunan infrastruktur ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai alokasi anggaran yang disetujui untuk dilaksanakan. Seperti dijelaskan oleh Bapak Eddy Irawan Setiadi ST, MT,

“Kita terus mengusulkan program-program penataan objek-objek wisata yang ada, sekaligus menggali potensi-potensi objek wisata yang dianggap layak untuk dibangun dan dikembangkan. Penggalan potensi wisata ini bekerja sama dengan Bidang Sejarah dan Kebudayaan. Bisa saja anggaran yang diajukan pada tahun berjalan tidak diakomodir, namun dialokasikan pada 2 (dua) tahun anggaran kemudian. Namun kami menyadari, kondisi ini hanyalah semata-mata karena keterbatasan dana yang ada”.²⁰⁹

Untuk perencanaan pengembangan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal, pendekatan berkelanjutan, pendekatan kesisteman, dan pendekatan kewilayahan. Model pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Hasnanda Putra, ST, MM Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran maupun Bapak Zainal Arifin, S.Sos Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan.²¹⁰

²⁰⁹Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

²¹⁰Lihat Penjelasan Bapak Hasnanda Putra, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dan Penjelasan Bapak Zainal Arifin, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh h. 147

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan berkelanjutan, yaitu merupakan pendekatan pemasaran pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) dan budaya yang ada di daerah pengembangan. Sebagaimana disebutkan oleh Mantan Walikota Banda Aceh Alm. Mawardy Nurdin, bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh saat ini diarahkan untuk peningkatan komitmen terhadap pembangunan dan pengembangan sektor budaya dan pariwisata yang mengedepankan aset daerah serta aset nasional sebagai perwujudan jati diri bangsa. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dikembangkan terus-menerus tanpa meninggalkan budaya Bangsa Indonesia umumnya, dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya.²¹¹

Pembangunan dan pengembangan pariwisata juga menggunakan pendekatan kesisteman, yaitu merupakan pendekatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara multisektoral, dimana kegiatan pariwisata terbentuk dari berbagai sektor dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain. Seperti dijelaskan oleh Bapak Hasnanda Putra,

“pemasaran pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetapi menjadi tanggung jawab seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Sebagai sebuah industri, aktivitas pariwisata saling terkait dengan industri lainnya yang saling melengkapi. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan kepariwisataan membutuhkan kerjasama, baik antar Satuan Kerja Perangkat Kota maupun para pelaku wisata”.²¹²

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata juga menggunakan pendekatan kewilayahan, yaitu pendekatan pemasaran pariwisata yang terintegrasi dengan sistem kewilayahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Iqbal, S.STP,

“Bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata di Banda Aceh tentu tidak dapat dilepaskan dengan daerah-daerah lain, sebab masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi keunikan masing-masing daerah sehingga menarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Sebagai contoh adalah kerjasama Banda Aceh, Sabang dan Juntho (BASAJAN)”.²¹³

²¹¹Mawardy Nurdin, h. 239-240

²¹²Hasil Wawancara, Tanggal 10 Pebruari dan 14 April 2014

²¹³Hasil Wawancara, Tanggal 14 April 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan model pendekatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam pemasaran objek wisata Islaminya. Kunjungan wisatawan pada daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata (DTW) tentu memiliki motif yang berbeda-beda. Namun objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata dimaksud. Suatu objek wisata akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan apabila potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut dikelola dan dikembangkan secara baik. Kemudahan untuk mengakses objek wisata dan tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Faktor lain yang mungkin penting adalah adanya keterikatan budaya maupun kepercayaan para wisatawan itu sendiri terhadap objek wisata yang dikunjunginya.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Banda Aceh adalah wisatawan dari Malaysia. Berdasarkan hasil indentifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi motif kunjungan wisatawan dari Malaysia ini adalah lebih kepada objek-objek wisata yang bersifat religius, seperti makam dan monument-monumen lain yang berkaitan dengan objek-objek peribadatan. Demikian juga wisatawan nusantara banyak yang berkunjung ke Banda Aceh pada objek-objek yang bersifat religious. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Eddy Setiadi Irawan, ST, MT Kepala Seksi Potensi, Objek dan Kawasan Wisata,

“Kunjungan wisatawan ke objek-objek yang bersifat religius seperti ke masjid dan makam semakin bertambah setiap tahunnya. Kami melihat ada peziarah yang menginap di tempat-tempat objek wisata seperti di kompleks makam Tgk. Syiah Kuala dan Tgk. Dianjong. Oleh karenanya perlu untuk dipikirkan pembangunan penginapan (mess) di sekitar objek dimaksud”²¹⁴

Untuk meningkatkan arus kunjungan wisata baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara program pemasaran wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melalui program tahunan kunjungan wisatawan atau lebih dikenal dengan program visit Aceh year. Program Visit Aceh pertama kali diselenggarakan pada tahun 2011, pencanangan program ini

²¹⁴Hasil Wawancara Tanggal 14 April 2014

diharapkan akan menjadi momentum dan media penting dan strategis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan wisatawan mancanegara serta wisatawan nusantara. Arti penting program ini adalah membentuk pesan dan kesan bahwa Aceh telah siap sebagai satu daerah tujuan wisata (DTW) yang aman, nyaman dan menarik, dengan berbagai daya tarik wisata alam, budaya, spritual dan keramahan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan *Visit Aceh Year* atau Tahun Kunjungan Aceh yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2013, dan diharapkan akan diselenggarakan kembali pada tahun 2014 ini. Namun, walaupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara belum seperti yang diharapkan, pemasaran objek-objek wisata harus terus menerus dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Said Fauzan

“Kita tidak boleh terpaku pada hasil apa yang kita peroleh saat ini, namun kita harus terus mengembangkan program-program apa yang kira-kira dapat diterima oleh orang lain (wisatawan). Kami terus mengembangkan ide, kreatifitas dan inovasi, sehingga produk wisata Aceh akan memiliki nilai tambah yang bersifat khas, kekinian dan menarik. Kami berharap pariwisata di Aceh pada masa yang akan datang akan menuju industri kreatif yang memiliki daya saing tinggi, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global.”²¹⁵

Pemasaran harus dirancang secara serius melalui berbagai produk wisata dengan menata dan mengembangkan ide, kreatifitas dan inovasi, sehingga produk wisata Aceh akan memiliki nilai tambah yang bersifat khas, kekinian dan menarik menuju industri kreatif Aceh masa depan yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

- e. Perencanaan pengembangan pesan komunikasi dalam pemasaran objek wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan. Tujuannya adalah agar mencapai sasaran organisasi sesuai yang direncanakan. Inti dari perencanaan komunikasi adalah strategi implementasi

²¹⁵Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

melalui artikulasi yang jelas dari jenis dan kombinasi media, taktik dan alat-alat yang akan digunakan. Perencanaan komunikasi adalah bagaimana mendapatkan pesan yang tepat kepada khalayak yang tepat dengan efek yang tepat. Sebagai jenis rencana, rencana komunikasi menyediakan serangkaian langkah-langkah perencanaan logis yang dapat digunakan untuk mengembangkan segala bentuk intervensi komunikasi, baik itu program komunikasi, proyek, rencana atau kampanye.

Karena kegiatan komunikasi pada dasarnya berupa penyampaian informasi (pesan) oleh komunikator kepada komunikan, maka masalah utama perencanaan pengembangan pesan komunikasi adalah bagaimana menerjemahkan tujuan komunikasi yang luas ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus dan terukur pada khalayak yang menjadi sasaran, bagaimana mengorganisasikan pesan, bagaimana memilih isi pesan untuk menyatakan tujuan organisasi, bagaimana mempertimbangkan jenis komunikasi yang akan dilakukan (misalnya informatif atau persuasive), dan bagaimana memperhatikan sikap khalayak sasaran terhadap pesan dan tujuan yang ingin dicapai.

Proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai sasaran pemasaran wisata Islami dilaksanakan baik secara perencanaan menyeluruh (holistic) maupun perencanaan secara terpilah. Secara menyeluruh diartikan tidak disusun berdasarkan unit-unit melainkan secara keseluruhan mengikat semua unit-unit dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perencanaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan diikat oleh suatu cita-cita yang dibangun oleh semua pihak dalam organisasi. Secara terpilah dimaksudkan mengutamakan program-program tertentu yang perlu diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam wawasan yang luas. Pendekatan ini dianggap memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan dengan kapasitas yang terbatas dan lebih rasional.

Bahwa proses perencanaan pembangunan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh disusun melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK), yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat. Melalui

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) kemudian disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) dan terakhir adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode 1 (satu) tahun. Ini merupakan perencanaan satuan kerja perangkat kota (SKPK) dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Urutan dari proses penyusunan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah proses menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung di dalam setiap tingkatan perencanaan dari yang strategis hingga ke operasionalnya. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus di ambil. Perencanaan komunikasi operasional, yaitu perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian tujuan. Melalui perencanaan strategik dan perencanaan operasional ini kemudian diterjemahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) untuk program-program kerjanya sesuai tugas dan pokok fungsinya masing-masing.

Demikian halnya proses penyusunan perencanaan program kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keseluruhan program kerja disesuaikan dengan perencanaan pembangunan, baik rencana jangka panjang (RPJPK) maupun jangka menengahnya (RPJMK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya menterjemahkan dalam bentuk perencanaan operasionalnya melalui program-program sesuai urutan prioritas kebutuhannya. Dalam penyusunan program operasionalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentu akan menyesuaikan dengan ketersediaan financial, kebutuhan local dan kondisi setempat, ketersediaan sumber-sumber (*resources*), Kesegeraan (*immediacy*), Kemungkinan respon khalayak dan pengalaman-pengalaman program sebelumnya.

Berkaitan dengan pemasaran objek wisata Islami, seperti telah diuraikan diawali melalui pendekatan berbasis komunitas (*community Based*). Model

pendekatan ini sesuai dengan tujuan visi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami. Di samping itu, berpedoman pada faktor sumber daya terbatas maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memandang perlu untuk melakukan segmentasi khalayak. Segmentasi pasar ini dianggap lebih tepat untuk berfokus pada jumlah segmen yang sedikit, atau mencari cara melalui penggabungan program untuk menghemat anggaran.

Untuk terpenuhinya hal-hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memerlukan cara-cara komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi publik yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan ruang dan media yang ada. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pelaku wisata dan masyarakat harus mudah dipahami, sehingga kesalahpahaman dapat dihindarkan. Pengorganisasian pesan komunikasi merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi atau meyakinkan khalayak sasaran. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, pesan yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi khalayak. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berkenaan isi pesan yang akan disampaikan. Berhubung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki staf yang ahli untuk pengolahan pesan pada media massa, maka diadakan kerjasama dengan pihak lain. Adapun pesan yang disampaikan dipilih sesuai dengan khalayak yang dituju dengan harapan mendapatkan umpan balik yang tepat. Menurut Bapak Said Fauzan, SSTP, MA Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

“untuk pembuatan isi pesan, kita tidak memiliki tenaga ahli untuk itu, kita kerjasama dengan pihak lain untuk penyusunan dan pembuatan pesan promosi, termasuk pembuatan brosur, leaflet, baliho dan pesan-pesan lain dalam banyak kegiatan dengan maksud untuk mendapatkan pesan yang tepat kepada khalayak yang tepat dan efek yang tepat”.²¹⁶

²¹⁶Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia, terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memasarkan objek-objek wisata di Kota Banda Aceh. Pertama adalah upaya membangkitkan kembali citra pariwisata Kota Banda Aceh khususnya setelah terjadinya musibah bencana besar gempa dan tsunami. Kedua menyangkut masalah kondisi keamanan Aceh yang selama ini cenderung negatif disebabkan adanya konflik-konflik internal antara pemerintah dan kelompok-kelompok lain di wilayah Aceh. Ketiga adalah berkenaan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah sesuai visi pemerintah Kota Banda Aceh.

“Pekerjaan yang paling sulit dalam pemasaran pariwisata adalah merubah pandangan orang khususnya wisatawan terhadap pariwisata di Kota Banda Aceh. Bagaimana kami secara perlahan melalui sosialisasi dan pembangunan nyata objek-objek wisata, sebenarnya mengirimkan pesan kepada stakeholder tentang peran dan tanggung jawab kami. Di dalamnya ada harapan mereka mendukung apa yang telah kami lakukan”. Jelas Bapak Said Fauzan.²¹⁷

Sesuai kriteria masalah-masalah yang dihadapi, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus memilih isi pesan untuk menyatakan program-programnya. Menurut hasil wawancara terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menata isi pesan berkaitan dengan pemasaran wisata yang akan disampaikan kepada khalayak.

1. Membangun *Brand Image*.

Cara ini adalah upaya merubah pandangan atau cara berpikir masyarakat, khususnya wisatawan melalui pesan-pesan tentang Kota Banda Aceh sebagai Daerah Tujuan Wisata. Usaha membangun *brand image* yang positif tentang kepariwisataan di Kota Banda Aceh secara terus menerus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik saat promosi maupun pada saat pelaksanaan event-event. Misalnya melalui program Tahun Kunjungan Aceh atau Visit Aceh Year pesan yang disampaikan adalah bahwa Aceh memiliki potensi sebagai daerah tujuan wisata dengan berbagai daya tarik wisata alam,

²¹⁷Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

budaya dan keramah-tamahan masyarakat Aceh yang sesuai nilai-nilai lokal. Selain potensi objek wisata, juga dinyatakan Kota Banda Aceh sebagai Destinasi yang aman dan nyaman.

2. Revitalisasi Produk Pariwisata.

Program revitalisasi merupakan bagian dari strategi pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Revitalisasi objek-objek wisata di Kota Banda Aceh merupakan perwujudan dukungan sepenuhnya terhadap pelestarian obyek wisata dan budaya sekaligus upaya pemberdayaan potensi Kota Banda Aceh sebagai Kota Wisata, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada pendapatan asli daerah, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui revitalisasi pesan-pesan yang disampaikan antara lain adalah objek wisata di Banda Aceh yang layak dijual di antaranya wisata tsunami dengan andalan kapal PLTD apung, yang terdampar di Gampong (Desa) Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Wisata religius seperti Masjid Raya Baiturrahman dan makam Kesultanan Aceh maupun jejak sejarah Kesultanan Aceh masa lalu, termasuk makam Tgk Syiah Kuala.

3. Sosialisasi Syariat Islam

Program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan visinya sebagai Bandar Wisata Islami dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah sebagai misinya. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menegakkan penerapan syariat Islam untuk warga kota. Salah-satunya adalah sosialisasi qanun-qanun syariat kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan dalam program ini adalah upaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap qanun-qanun syariat Islam, membangun partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan syariat islam, mewujudkan masyarakat yang bersyariat dalam rangka mendukung terwujudnya Banda Aceh sebagai model kota madani dan menggerakkan peran tokoh masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara benar.

Hal lain yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menata isi pesan berkaitan dengan pemasaran wisata adalah pemilihan jenis komunikasi yang akan dilakukan. Terdapat 2 (dua) jenis komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyampaian program-programnya yaitu jenis komunikasi informatif dan komunikasi persuasif. Untuk komunikasi informatif biasanya lebih ditujukan kepada para wisatawan melalui promosi. Sedangkan jenis komunikasi persuasif lebih kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan. Untuk jenis komunikasi informatif, isi pesan biasanya singkat dan jelas, menggunakan istilah-istilah yang sederhana, menggunakan data kongkret, dan memasukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Untuk jenis komunikasi yang persuasif, isi pesan biasanya mengandung unsur-unsur: menarik perhatian, meyakinkan, dan menyentuh atau menggerakkan. Pemilihan ini menjadi penting sebab akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pesan-pesan yang disampaikan khususnya menyangkut pemasaran objek wisata adalah sikap khalayak sasaran terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat beberapa sikap khalayak sasaran sebagai efek program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :

1. Jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara yang datang Ke Provinsi Aceh (Orang) Tahun 2008-2012 belum seperti yang diharapkan seperti yang diperlihatkan pada Table 1.3 dan Table 1.4
2. Penyimpangan terhadap hukum syariat yang berlaku, khususnya remaja yang berperilaku di luar konteks Banda Aceh sebagai Bandar wisata Islami, dari segi berpakaian, beretika, dan bertutur kata.
3. Kurangnya kejujuran masyarakat/oknum tertentu terhadap wisatawan. Ketika wisatawan berkunjung, mereka akan mencari keuntungan tanpa menpedulikan bagaimana citra yang terbentuk dari tindakan ini.
4. Dukungan sepenuhnya dari banyak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atas kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh.

f. Perencanaan saluran komunikasi dalam pemasaran wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Saluran komunikasi dapat diartikan adalah alat atau media yang dapat digunakan oleh individu-individu atau kelompok serta organisasi yang melakukan komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Dalam prakteknya, organisasi harus mampu mengidentifikasi dan sekaligus memilih saluran komunikasi atau media yang efektif. Pilihan terhadap penggunaan saluran komunikasi atau media umumnya tergantung pada maksud dan tujuan komunikasi yang dilakukan. Bila media yang digunakan memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat dan alat yang digunakan juga memiliki kredibilitas, maka masyarakat akan memiliki persepsi yang positif terhadap institusi atau organisasi.

Kemampuan untuk mengelola pesan dan media menjadikan prasyarat utama untuk keberhasilan penyampaian informasi kepada khalayak utama serta umpan balik yang diharapkan. Kajian utama dalam tahap ini adalah bagaimana menentukan saluran (media) sesuai tujuan program (sekedar menginformasikan, atau mau mengajarkan sesuatu, atau mau membujuk), bagaimana memilih dan mengkombinasikan dari pemanfaatan saluran (media), taktik dan alat-alat yang akan digunakan dalam mendapatkan pesan yang tepat kepada khalayak yang tepat dengan efek yang tepat dan bagaimana menentukan tingkat kredibilitas saluran (media) dan alat yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mempromosikan program-programnya. Ada program promosi yang langsung dilakukan oleh aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata, ada program promosi melalui kerjasama dengan pelaku wisata dan ada juga program promosi yang dilakukan melalui saluran komunikasi atau media. Pemilihan cara promosi ini disesuaikan dengan program apa yang akan dilakukan, jenis komunikasi apa yang digunakan dan sasaran khalayak yang akan dijangkau. Untuk pemilihan saluran komunikasi atau media, apakah media cetak maupun media elektronik lebih kepada masalah anggaran yang tersedia. Seperti yang

dikatakan oleh Bapak Said Fauzan, STTP, MA Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

“Pilihan terhadap promosi menjadi sulit, kalau kita dihadapkan pada persoalan anggaran. Oleh karenanya kreativitas diperlukan agar program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kreativitas dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan saluran media cetak dan media elektronik dalam program promosi tanpa menggunakan anggaran dana yang besar”.²¹⁸

Program promosi yang langsung dilakukan oleh aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata atau melalui kerjasama dengan dinas lain atau pelaku wisata, bentuk komunikasi dilakukan melalui wawancara langsung. Khalayak dalam hal ini adalah masyarakat maupun para pelaku wisata. Kegiatan dapat dilakukan langsung pada sekitar objek-objek wisata maupun pertemuan tertentu melalui undangan rapat kepada tokoh-tokoh masyarakat atau pelaku wisata. Topik yang dipilih dalam kegiatan ini pada umumnya berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan program pariwisatanya. Beberapa kegiatan antara lain adalah;

1. Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), untuk mengajak masyarakat agar hidup bersih.
2. Sosialisasi Qanun No. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA). Tujuannya adalah peran lembaga adat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh untuk mendukung visi menjadikan Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami.
3. Sosialisasi qanun nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan kepada Pengusaha hotel dan restoran Indonesia (PHRI) provinsi Aceh.
4. Sosialisasi qanun-qanun Syariat kepada masyarakat melalui Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai upaya dalam rangka menegakkan penerapan syariat Islam untuk warga kota.
5. Program Fam Trip dan Table Top yaitu kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh mempromosikan objek-objek wisata Banda Aceh melalui agen travel Malaysia. ke tingkat internasional.

²¹⁸Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

Dalam program promosi melalui saluran komunikasi atau media, biasanya pemilihan media apakah cetak maupun media elektronik dilakukan melalui kerjasama program atau acara yang dianggap baik dan menarik. Untuk media elektronik menurut Bapak Said Fauzan, STTP, MA

“Sungguhlah sulit kalau kita hunting program atau acara televisi secara tersendiri, cara yang paling mungkin dilakukan adalah melalui hunting program yang dilakukan oleh Televisi. Kita melihat acara atau program apa yang bagus dan menarik. Misalnya program budaya atau pariwisata, lalu bagaimana kita mengusahakan agar lokasinya dilakukan di Kota Banda Aceh. Kita memberi support pada mereka seperti menyediakan penginapan, akomodasi dan bantuan lainnya sehingga tujuan kerjasamanya saling menguntungkan bagi keduanya.”²¹⁹

Untuk program promosi melalui media cetak adalah melalui kerjasama dengan surat kabar, misalnya menyangkut berita-berita budaya dan pariwisata yang dianggap bagus dan menarik. Seperti dikatakan Bapak Said Fauzan,

“Kita mengundang jurnalis dari beberapa media surat kabar untuk berkunjung ke Banda Aceh, mereka kita beri fasilitas dan kita ajak berkeliling pada seluruh objek-objek wisata yang ada. Kemudian kita minta mereka untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka selama di Banda Aceh melalui tulisan pada surat kabar mereka masing-masing”.²²⁰

Beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam promosi, antara lain :

1. Pemasangan poster dan baliho di jalan-jalan protokol dan di sekitar objek wisata Kerjasama pembuatan acara di salah satu stasiun TV swasta nasional
2. Pemasangan iklan di inflight megazine airline seperti Lion Air dan Garuda
3. Iklan melalui multimedia, pembuatan website, iklan melalui jejaring social (facebook, twitter),
4. Kerjasama dengan pers, mengundang wartawan untuk liputan khusus di Banda Aceh.

²¹⁹Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

²²⁰Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

Berkenaan dengan tingkat kredibilitas saluran (media) dan alat yang digunakan dalam pemasangan pesan untuk promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pilihannya lebih kepada masalah anggaran yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Said Fauzan, STTP, MA Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada peneliti,

”adanya perubahan harga yang semakin tinggi dalam pemasangan iklan sehingga pemilihan media menjadi diabaikan. Sebagai contoh adalah pemasangan iklan di *inflight magazine airline*. Untuk saat ini hanya dilakukan pada penerbangan Lion Air sedangkan untuk Garuda tidak lagi diadakan kerjasama oleh karena tingginya biaya yang dibutuhkan”.²²¹

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan saluran komunikasi atau media menjadi demikian penting dalam upaya pencapaian tujuan komunikasi yang dilakukan. Faktor lain adalah bagaimana memilih dan mengkombinasikan pemanfaatan saluran (media), taktik dan alat-alat yang akan digunakan dalam mendapatkan pesan yang tepat kepada khalayak yang tepat dengan efek yang tepat serta bagaimana menentukan tingkat kredibilitas saluran (media) yang digunakan.

- g. Evaluasi implementasi perencanaan komunikasi dalam pemasaran wisata Islami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Evaluasi diartikan sebagai mengukur seberapa baik program mencapai tujuannya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa program efektif atau tidak, termasuk dampak kegiatan yang berbeda pada khalayak yang berbeda. Program senantiasa dituntut untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan informasi dan mekanisme pemantauan, agar penyimpangan–penyimpangan yang terjadi di lapangan dapat diketahui sesegera mungkin dan selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan. Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik.

Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi *on going* dan *end review*. Evaluasi *on going* dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga

²²¹Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014

fleksibilitas sebuah program. Sedangkan *end review* mencakup semua evaluasi dari awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi *on going* dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa evaluasi dari keseluruhan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) cara seperti yang telah dijelaskan di atas. Sebagaimana dijelaskan Bapak Said Fauzan,

“Evaluasi dilakukan dengan menggunakan cara evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*) maupun dengan cara evaluasi akhir pelaksanaan (*end review*). Evaluasi *on going* dimaksudkan adalah untuk melihat apakah tahapan pelaksanaan program telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan atau perlu diadakan perbaikan untuk penyempurnaannya. Cara *end review* adalah cara yang biasa dilakukan, yaitu evaluasi pada akhir tahun anggaran”.²²²

Evaluasi *on going* dilakukan pada saat pelaksanaan program untuk melihat apakah telah sesuai dengan rencana. Pelaksanaan evaluasi ini dimungkinkan untuk dilakukan, sebab di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan rapat rutin setiap minggunya. Rapat yang dihadiri seluruh staf pegawai ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Melalui rapat ini juga akan diadakan evaluasi pada program-program yang sedang berjalan, dan jika perlu diambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki program dimaksud.

Untuk evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Ini merupakan perencanaan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. Proses evaluasi ini selain dilakukan melalui rapat-rapat internal organisasi, juga dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal. Oleh karenanya pengumpulan data dari para pelaku wisata, maupun dari para wisatawan menjadi penting sebagai bahan penyusunan program yang akan dibuat.

²²²Hasil Wawancara Tanggal 10 Pebruari, Tanggal 19 Maret dan Tanggal 14 April 2014